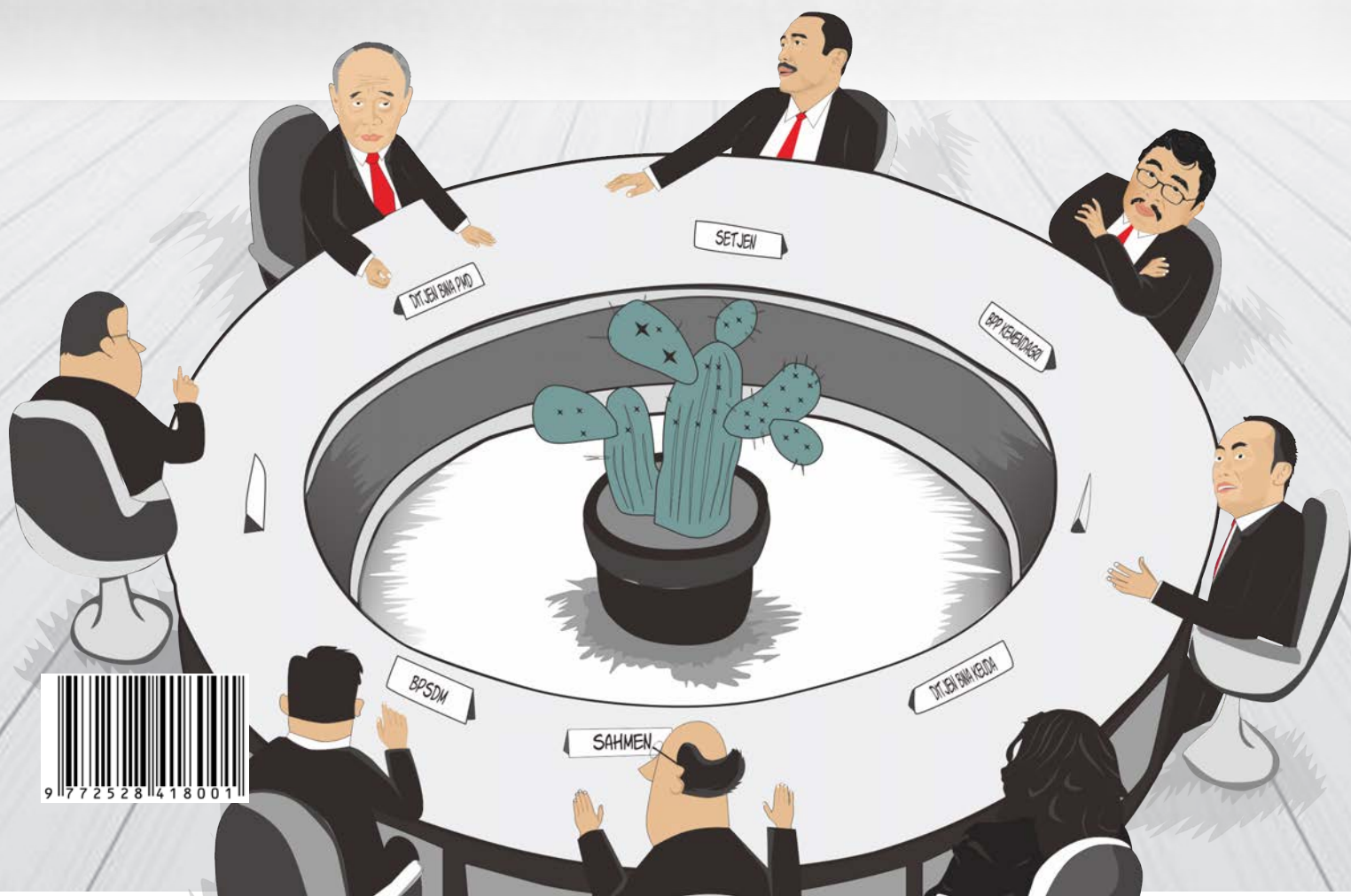


MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM



CALL FOR PAPERS

Terbit Setiap Mei dan November

MATRA PEMBARUAN

“Jurnal Inovasi Kebijakan Pemerintah”

- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Lampirkan alamat dan nomor telepon penulis.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.
- Sumber referensi minimal 10 buah dan 80% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.
- Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*) style.

BPP
KEMENDAGRI



JURNAL MATRA PEMBARUAN

<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Tahun 2019 merupakan tahun ke-empat MEDIA BPP bertransformasi menjadi media yang tidak hanya berkualitas dari sajian beritanya, tetapi juga dari tampilan. Kualitas media publikasi BPP Kemendagri juga senyatanya harus bisa diimbangi oleh program-program yang dijalankan BPP Kemendagri dari tahun ke tahun.

Pada edisi pertama tahun ke-empat ini, MEDIA BPP secara khusus mengulas kesimpulan forum majelis pertimbangan BPP Kemendagri yang dilaksanakan di Hotel Borobudur, Desember 2018 lalu.

Pertemuan tersebut dalam rangka mendengarkan beberapa problematika mitra kerja BPP Kemendagri yaitu setiap komponen Kemendagri yang terdiri dari beberapa Ditjen dan Badan serta institusi yang ada di Kemendagri.

Dari pertemuan tersebut muncul harapan baru agar BPP Kemendagri bisa memberikan masukan yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh komponen Kemendagri.



BPP Kemendagri diharapkan bisa menangkap setiap pesan dan saran setiap komponen untuk dijadikan isu utama dalam proses penyusunan program kelitbangan. Dengan begitu, *output* kelitbangan yang dihasilkan benar-benar bisa direalisasikan oleh *stakeholders*. Forum tersebut juga diharapkan tidak sekadar seremonial tahunan yang dilaksanakan secara formal, lalu abai terhadap isu program kegiatan yang disarankan. Akhirnya isu penelitian yang dilaksanakan hanya ritus tahunan, sambil berharap banyak perhatian mitra kerja, ketika *outputnya* jelas tak terasa.

Pada edisi kali ini, MEDIA BPP juga membahas potensi daerah Sulawesi Tengah, dan peran BPP Daerah Sulteng dalam memanfaatkan potensi tersebut. BPP Sulteng juga tengah fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca-bencana.

Tidak lupa, liputan daerah terkait budaya dari Bau-bau juga kami sajikan. Untuk menambah khazanah pembaca mengenai warga bangsa. Dan diharapkan dapat menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Selamat membaca....

Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TAJHO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	ANSELMUS TAN KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA RAHAYU KELANA
PELIPUTAN	GALUH CANDRA WISESA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

Teror Pembakaran Kendaraan

Beberapa hari ini kita merasa resah terkait teror pengrusakan kendaraan bermotor yang dilakukan oknum di Jawa Tengah. Dari beberapa media disebutkan teror tersebut memiliki motif yang buruk yaitu untuk mengganggu ketentraman masyarakat. Apakah teror ini berkaitan dengan pemilu presiden yang akan berlangsung April mendatang. Kemudian apakah BPP Kemendagri juga memungkinkan untuk meneliti ke arah sana, terkait apa yang bisa dilakukan Kemendagri?

- Pembaca Media BPP-

Mendagri Tjahjo Kumolo sudah memberikan keterangan kepada media, teror tersebut tidak ada kaitannya dengan dendam. Teror tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak jelas apa motivasinya. Tapi terorganisasi tapi bisa masuk kategori kelompok organisasi yang gelap. Tindakan tersebut disebut Mendagri mengarah untuk merusak suasana, merusak ketentraman dan ketertiba terkait tindakan meresahkan tersebut. Solusinya Mendagri menyaraan agar Siskamling digerakan dengan melibatkan warga bersama kepolisian dan Satpol PP. Kemudian terkait penelitian, Semoga BPP Kemendagri bisa menangkap isu yang berkembang, bahwa ancaman keamanan negara bisa terjadi kapan saja.

Redaksi

Perlu IT Support

IT Support perlu hal yang paling penting dimiliki BPP Kemendagri sebagai lembaga kelitbangan. Dan itu seharusnya bukan lagi hal yang baru. Di beberapa universitas ternama seperti La Trobe University, IT support berfungsi baik untuk menunjang riset. Di dalamnya terdapat software pendukung kinerja riset. Beberapa aplikasi sudah terinstal dan tersedia di base portal. Seperti Adobe, nvivo, SPSS, mendeley, dll. Ada disitu semua. Tentu itu juga perlu didukung dengan fungsi lab data yang ada di BPP Kemendagri.

- Ray Ferza, Peneliti BPP-

Redaksi mengakui selama ini di BPP Kemendagri, belum terlalu memaksimalkan fungsi laboratorium data. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan dengan lab

data. Misalnya melakukan survey, pencarian referensi, pencarian data, dan hal lain yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan yang tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Pada waktu yang akan datang semoga harapan Saudara bisa diwujudkan. Amin..

Redaksi

Peneliti BPP

Saya melihat minimnya peneliti BPP Kemendagri menulis di jurnal internalnya sendiri seperti Jurnal Bina Praja dan Matra Pembaruan atau jurnal di luar BPP Kemendagri. Hal ini bisa dilihat dari data Sinta Ristekditi yang ada. Peringkat lembaga BPP masih jauh dari lembaga riset lainnya. Padahal perogram penelitian di BPP Kemendagri dilakukan setiap tahun. Padahal saya sangat membutuhkan hasil-hasil riset Kemendagri untuk referensi penelitian ilmu pemerintahan dan politik. Apakah tidak ada kewajiban, Peneliti yang ada di BPP Kemendagri menulis di jurnal ilmiah?

- Pembaca Media BPP-

Diakui atau tidak memang faktanya produktivitas peneliti BPP Kemendagri menulis di jurnal ilmiah sangat minim. Bisa dikatakan tidak sampai 100 persen dari peneliti yang ada, yang rutin menulis di jurnal ilmiah. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, jurnal ilmiah yang terakreditasi semakin menaikkan standar penulisan, sehingga para peneliti merasa kesulitan. Atau bisa juga karena kurangnya pendampingan cara penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar. Di masa depan kita harapkan peneliti BPP Kemendagri bisa produktif menulis...

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email redaksimediabpp@gmail.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 4 NO 1 | JANUARI-FEBRUARI 2019

BPP DAERAH 32 BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI PASCA-BENCANA

Potensi sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi anugrah sekaligus "kutukan" di tengah perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian.



DAERAH 36

PELANGI NEGERI DI PERUT BUMI
Mengunjungi Baubau, kota yang berdiri kokoh di Pulau Buton, seperti mengunjungi sebuah wilayah yang memberi warna peradaban bangsa. Baubau seperti surga di timur Indonesia. Selain keindahannya yang memesona, Baubau ibarat pelangi yang memiliki berbagai tradisi dan budaya, serta kuliner yang sarat makna. Di sanalah nilai-nilai universal berpadu dengan lokalitas.

LEBIH DEKAT 40

**MUHAMMAD WILDAN, DIREKTUR
CISFORM
RISET GURU AGAMA ISLAM UNTUK
MENCEGAH PAHAM RADIKAL**

Merebaknya isu radikalisme dan berkembangnya ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila, membuat Muhammad Wildan melalui pusat studi CISForm tergugah untuk melakukan penelitian radikalisme di sektor Pendidikan, dengan judul Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia.

JENDELA BPP 6-13

GAYA HIDUP 42

SAINS DAN
TEKNOLOGI 43

RESENSI BUKU 44

RESENSI FILM 46

SASTRA 48

KOMIK 51

KILAS BERITA 52

OPINI

SAMPAH LAUT DAN KISAH TRAGIS IKAN
PAUS 54

CAPAIAN KINERJA BU RISMA 56

CATATAN
TEKNOLOGI INFORMASI 58

LAPORAN UTAMA 18-28

MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM

Forum Majelis Pertimbangan BPP Kemendagri yang dilaksanakan pada Desember 2018 lalu, memberikan gambaran utuh program kegiatan yang bisa diimplementasikan BPP Kemendagri. Beberapa usulan masing-masing komponen juga merupakan isu penting mengenai permasalahan pemerintahan dalam negeri, seperti kurangnya perhatian terhadap Binwas dan APIP hingga optimalisasi dana otonomi khusus. Dari semua isu penting untuk dilakukan kajian itu, mampukah BPP Kemendagri membuat gebrakan program seperti yang disarankan komponen, atau masih kekeueh pada rutinitas penelitian yang sama yang dilaksanakan setiap tahun, sambil berharap penelitian itu dimanfaatkan.



Fungsi Fasilitasi Kemendagri Lemah, BPP Dituntut Sajikan Data

JAKARTA - Sumedi Andono Mulyo Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan- Kementerian PPN/BAP-PENAS menyarankan perlunya transformasi dan akselerasi pembinaan ke daerah. Ia mempertanyakan transformasi seperti apa dan akselerasi apa saja yang sudah dilakukan Kemendagri dalam rangka membina pemerintah daerah.

“Apa yang bisa dilakukan dalam akselerasi pembangunan di daerah. Pertanyaan ini penting, pasalnya kaitannya dengan 5 fungsi Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Lima fungsi tersebut di antaranya fungsi regulasi, koordinasi, konsultasi, eksekusi, dan fasilitasi,” ucapnya dalam Dalam Rapat Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2020 di Hotel Media, Jakarta (2/4).

Sumedi menambahkan, Kemendagri saat ini masih berfokus di fungsi regulasi, sementara fungsi fasilitasi masih sangat lemah. Padahal fungsi tersebut, akan membantu daerah menjadi berkembang dan mandiri. Di sisi lain, akibat banyaknya regulasi, saat ini beberapa daerah tengah mengalami tsunami peraturan. “Seorang kepala daerah dituntut banyak memahami peraturan. Mereka baru memahami peraturan sudah muncul lagi peraturan baru,” ucapnya.

Untuk itu, Sumedi menyarankan perlunya Kemendagri melakukan fasilitasi dengan mendampingi daerah memahami regulasi. Selain itu juga perlu melakukan deregulasi, yaitu mengurangi regulasi yang menghambat inovasi di daerah. Sumedi menyarankan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri seharusnya



melakukan riset terkait regulasi yang memberatkan hingga memiliki peta kapasitas dan kinerja daerah.

“Misalnya, daerah yang memiliki kapasitas tinggi dengan kinerja tinggi masuk kuadran satu, daerah dengan kapasitas tinggi dan kinerja rendah masuk kuadran dua, daerah mana saja yang masuk dalam kuadran tersebut. Sehingga dengan begini kita bisa menemukan titik masalahnya,” terangnya.

Sumedi juga menekankan pentingnya data, sistem informasi, dan pengetahuan. Semua perencanaan di Kemendagri juga harus mengacu kepada hal tersebut. Ia juga berharap BPP mempunyai data pelaksanaan pembangunan di daerah.

Terkait saran Sumedi, Mohammad Noval Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri mengatakan untuk mencapai target Kemendagri perlu dilaksanakan pemetaan pegawai atau Sumber Daya Manusia yang ada di internal Kemendagri. “Yang harus dilakukan adalah membangun kompetensi pegawai. Bagaimana mau me-

rumuskan target, jika di Kemendagri sendiri, pemetaan personel saja bukan pada tempatnya,” ucap Noval.

Selanjutnya menurut Noval Kemendagri perlu melakukan pemetaan kelembagaan, sehingga menjadi organisasi yang lebih efektif. Kemudian sinergi perlu dilakukan ketika menyusun RPJMN. Pasalnya, dalam menyusun RPJMN, data sangat diperlukan.

“Kita di internal Kemendagri, harus banyak bersinergi untuk menampilkan data ketika melakukan sinergitas program. Bagaimana kita melakukan sinergi program kalau data kita sendiri masih kita pakai sendiri. Jangankan data Komponen, kadang-kadang di Komponen sendiri, kita susah meminta data,” jelas Noval.

Menurut Noval, data sangat penting untuk memperkuat arah kebijakan di masa depan. Untuk itu ia berharap Kemendagri bisa duduk bersama, dan bersinergi dalam merumuskan target pencapaian Kemendagri.

■ SAIDI RIFKY

Banyak Isu Nasional Pertahanan dan Keamanan Negara yang Perlu Dikaji



JAKARTA - Mohammad Noval, Kepala Bagian Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri mengatakan, terdapat beberapa isu strategis pertahanan dan keamanan negara yang berhubungan langsung dengan pemerintahan dalam negeri. Isu-isu tersebut di antaranya krisis politik, konflik sosial, dan desentralisasi urusan pemerintahan.

“Banyak isu-isu yang bisa dikaji terkait pertahanan dan keamanan negara, misalnya, desentralisasi urusan pemerintahan, krisis politik, dan konflik sosial yang bisa dikaji oleh BPP Kemendagri maupun lembaga kelitbang seperti Kementerian Pertahanan,” kata Noval ketika bertemu para staf BPP Kementerian Pertahanan di BPP Kemendagri, Jumat (2/8).

Dalam kasus desentralisasi, misalnya, menurut Noval kerap timbul gejolak di daerah terkait tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perbatasan wilayah dan pengelolaan sumber daya alam.

Begitu juga dalam hal politik, kurangnya pendidikan politik di masyarakat, sering memicu kecenderungan kasus-kasus intoleransi dan SARA. Masyarakat juga tidak bisa menerima perbedaan politik. “Contohnya dalam pilkada, dan pilpres, hanya gara-gara beda pilihan jadi *berantem*, keluar grup *whatsapp*,” tutur Noval.

Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Mauritz Panjaitan menambahkan, ancaman negara tidak hanya dari tiga hal yang disebutkan Noval. Menurutnya,

5 tahun yang akan datang, negara juga harus mewaspadai ancaman lingkungan global seperti emisi karbon dan banyaknya penyakit. “Misalnya munculnya stunting baru-baru ini, kemudian penyakit lama yang muncul kembali seperti tuberkulosis, dan wabah lainnya, ini juga aspek penting yang harus dikaji untuk memperkuat keamanan negara,” terang Mauritz.

Peneliti BPP Kemendagri Alex Dalla memiliki pandangan berbeda. Menurutnya yang lebih penting juga terkait kewilayahan seperti peran lembaga negara terkecil seperti kelurahan dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Bagaimana peran seperti RT/RW dan kelurahan itu harus diperkuat, karena bagaimana pun urusannya pasti terkait administrasi kependudukan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Alex, masalah serius lainnya juga terkait kawasan ekonomi khusus seperti Batam. Batam dikembangkan dengan cita-cita awalnya sebagai zona ekonomi khusus yang diharapkan bisa menyaingi Singapura. Namun saat ini Batam menjadi tidak berkembang. Dari hasil penelitian yang ia lakukan, penyebabnya karena Batam terlalu banyak campur tangan investor asing dari Singapura dan Malaysia yang banyak membeli tanah di Batam, namun dibiarkan terbengkalai.

“Misalnya mereka membeli tanah luas dan membiarkannya mangkrak. Mereka memiliki niat agar Batam tidak berkembang. Cara mereka sangat pintar yaitu dengan menikah dengan masyarakat Batam. Sehingga hak milik tanah adalah hak milik orang Indonesia,” papar Alex.

■ SAIDI RIFKY

Gandeng Perguruan Tinggi, BPP Siapkan ToR dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

JAKARTA – Kasubbag Kerja Sama Kelitbang Hukum dan Perundang-undangan Elisabeth Eni mengapresiasi rencana kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Donor. Namun, Bagian Perencanaan BPP harus mau mengakomodasi permintaan kerja sama dengan kedua lembaga tersebut.

“Usulan yang diterima diharapkan dalam bentuk rencana kerja sama baik bersifat ToR dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mendukung kegiatan dimaksud,” kata Elisabeth di kantor BPP Kemendagri Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019).

Kerja sama Lembaga Donor dan perguruan tinggi itu, perlu disepakati komitmen bersama antara para pelaksana kerja sama dengan pihak ketiga. Tujuannya agar proses kerja sama ini bisa berjalan dengan optimal. “Perlu kita adakan monitoring yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan sehingga proses kerja sama ini bisa berjalan dengan optimal,” ungkapnya.

Karena itu, kata Elisabeth, tindak lanjut dari kerja sama ini nantinya diharapkan penyiapan *Term of Reference* atau Kerangka Acuan Kerja. ToR dan RAB ditunggu dari Pusat Litbang. BPP juga akan mengundang Pusat Fasilitas Kerja Sama Setjen Kemendagri dalam menindaklanjuti prakarsa kerja sama ini.

Sementara itu, Kepala Bagian PJKSE Yusnaswir menyarankan perlu konsep yang matang terkait kerja sama antara bpp dengan perguruan tinggi maupun Lembaga Donor. Pasalnya, kegiatan tersebut tidak diakomodasi oleh APBN.

“Untuk 2019 ini sepertinya dari APBN belum bisa mengakomodasi kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM fungsional peneliti. Kegiatan peningkatan SDM ini baru bisa diakomodasi pada 2020 dalam pengusulan APBN,” kata Yusnaswir.

Untuk itu, diharapkan nantinya LIPI dapat melakukan kerja sama dengan Badan Litbang dalam penguatan kapasitas yang semua modulnya dipegang penuh oleh LIPI tetapi pelaksanaannya dilakukan di BPSDM.

Selain itu, bimbingan teknis juga akan direncanakan dengan Kemenristek Dikti dengan bantuan BPSDM. Adapun terkait peningkatan kapasitas yang lebih bersifat bantuan sekolah akan dikordinasikan lagi oleh bagian PJKSE sebagai lembaga pengelola kepegawaian.

“Terkait pengembangan kapasitas peneliti diharapkan juga melakukan kerjasama dengan peneliti dari perguruan tinggi negeri dan swasta,” tutupnya.

■ M. FIRDAUSY

<https://www.americannursestoday.com>



Perlunya Membangun Kualitas SDM BPP Daerah



JAKARTA - Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu persoalan bagi pemerintah daerah untuk membentuk BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Daerah. Terlebih peraturan LIPI No 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, BAB XVII yang menyatakan peningkatan kualifikasi syarat jabatan yakni S2 untuk peneliti. Karena itu, BPP Kemendagri mencari solusi dengan melakukan pembinaan ke BPP Daerah.

Rachman Kosasih, Kepala Subbag Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Sisdur Serta Evaluasi Kinerja ASN (PJKSE) menceritakan awal pembentukan BPP Daerah. Pada 2017 sejak disahkannya PP No 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan membentuk badan litbang. Persoalannya, pemerintah daerah masih kesulitan membentuknya karena ketiadaan fungsional peneliti.

“Dalam membentuk BPP Daerah persoalan utama ialah SDM. Idealnya sebagai badan litbang mempunyai beberapa perekayasa kebijakan dan peneliti. Nah mereka kebingungan dalam hal itu. Terlebih mereka terbentur dengan peraturan baru LIPI terkait peneliti,”ungkap Rachman saat ditemui di ruangannya, Kamis (31/1).

Untuk merekrut peneliti dan memenuhi syarat dari LIPI, Rachman menerangkan, BPP Kemendagri pernah mewacanakan *inpassing* jabatan (penyesuaian). Namun, hal itu tidak diperbolehkan karena dalam sejarah fungsional peneliti dibentuk, tidak pernah ada *inpassing* jabatan. Ini dilakukan

demi menjaga profesionalitas peneliti, karena itu dari hasil rapat BPP Kemendagri, maka BPP Kemendagri mencari peluang anggaran untuk meningkatkan jenjang pendidikan para perangkat fungsional peneliti.

Terkait peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, yang isinya mewajibkan peningkatan kualifikasi syarat jabatan, peneliti minimal lulusan Strata-2 (S2), dinilai memberatkan BPP Daerah dalam melakukan rekrutmen peneliti.

“Kalau pun *inpassing* jabatan dibolehkan LIPI, syaratnya tambah berat. Misalnya, PNS golongan IVA menjadi peneliti madya harus mempunyai empat sertifikat sebagai pemakalah dalam seminar nasional. Jadi, semangat *inpassing* jabatan yang menjadi harapan mereka gugur. Makanya, dalam rapat pembinaan BPP Daerah (29-30 Januari) kita mencari peluang anggaran untuk meningkatkan strata pendidikan mereka, salah satunya dari lembaga donor,”ucapnya.

Dalam kegiatan pembinaan BPP Daerah yang akan dilakukan BPP Kemendagri, ia akan menyampaikan bimbingan teknis cara pemenuhan jabatan fungsional dan peneliti di BPP Daerah. Rachman berharap, pejabat fungsional BPP Daerah tergugah untuk melanjutkan S2 dan LIPI dapat membuat peraturan *inpassing* jabatan agar BPP Daerah bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

“Promosi beasiswa untuk S2 sebagai daya tarik bagi pejabat fungsional agar mau menjadi peneliti nantinya,”pungkasnya.

■ GALUH CANDRA WISESA

MEMICU DAYA SAING DENGAN DATA INDEKS INOVASI DAERAH

Inovasi adalah cara untuk memenangkan persaingan baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Pada era sekarang ini tidak ada bangsa atau industri yang maju dan mampu bersaing tanpa adanya inovasi. Begitu pun, kemajuan dari suatu daerah terlihat dari seberapa suksesnya inovasi tersebut dijalankan dan membawa dampak manfaat bagi masyarakat. Karena itu, indeks inovasi sebagai parameter keberhasilan daerah.

Saydiman Marto, Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri mengatakan, indeks inovasi daerah meliputi 35 indikator. Indikator tersebut mencakup *input*, *output*, dan *outcome* di mana inovasi daerah yang akan dibuat harus memenuhi hal tersebut. Selain itu, fungsi indeks inovasi ialah sebagai penilaian laik atau tidaknya inovasi daerah itu diimplementasikan.

Penyusunan indeks inovasi daerah, dimulai dari pemberian masukan oleh daerah terkait kondisi daerahnya. Lalu, ditentukan berdasarkan kelompok atau klaster antara lain klaster Provinsi, Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Daerah Timur dan klaster lainnya. Kemudian, penilaian inovasi daerah disesuaikan dengan Permendagri No 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah. Dengan melakukan penjarangan, pengukuran indeks, presentasi, dan validasi lapangan. Selanjutnya, pemerintah daerah wajib memberikan data inovasi ke Kemendagri yang nantinya akan diverifikasi, dianalisis dan dinilai. Setelah dilakukan penilaian, daerah yang sukses dengan inovasi daerahnya

akan diberi penghargaan melalui *Innovative Government Award (IGA)*.

“Di dalam indeks inovasi daerah Kemendagri ada inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya. Kita berencana indeks itu menjadi bank inovasi. Jadi, untuk daerah yang hendak mengikuti ajang penghargaan inovasi daerah, baik dari Kemendagri atau lainnya, bisa melihat indikator apa saja yang harus dipenuhi untuk melengkapi data inovasi daerahnya sebelum dilombakan,”ucap Saydiman.

Menurut Saydiman, indeks inovasi daerah memicu peningkatan daya saing daerah baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Sebab, pemerintah daerah mengetahui kekurangan dan kebutuhan dari kondisi daerahnya. Dengan begitu, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi, demi mengatasi kondisi tersebut. Selain itu, daya saing pada era globalisasi adalah proses menuju kemandirian suatu daerah. Pasalnya, inovasi atau daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan persaingan global dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

“Karena melalui indeks inovasi akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang inovatif. Inovasi itu diciptakan untuk memudahkan masyarakat, secara otomatis menciptakan daya saing.



Dampaknya bisa ke pergerakan ekonomi yang melaju pesat dan lainnya, selain mendorong daya saing daerah juga upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah.”ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri Safrizal menambahkan, indeks inovasi daerah selain menjadi indikator penilaian, juga digunakan sebagai dasar pembinaan terhadap pelaksanaan inovasi yang ada di daerah. Disamping itu, indeks inovasi daerah menentukan tingkatan/rangking daerah setelah melalui proses penilaian. Pada 2018 dari 286 daerah yang telah menginput dan dilakukan penilaian, setelah itu terjaring 25 daerah dari provinsi, kabupaten/kota. Dari 25 daerah tersebut diundang untuk presentasi di depan para tim penilai dari berbagai unsur Kementerian dan Lembaga.

”Hasil dari penilaian tersebut akhirnya ditetapkan peringkat pemenang

penghargaan daerah inovatif melalui ajang IGA. Untuk tahun ini peringkat pertama Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung. Saya berharap hasil dari IGA setiap daerah termotivasi menciptakan inovasi daerah,”ucapnya.

Selain 25 daerah pemenang rangking indeks tersebut, pemberian penghargaan IGA 2018 juga diberikan penghargaan inovasi kepada 3 daerah terinovatif berdasarkan klaster daerah tertinggal, klaster daerah perbatasan dan klaster daerah Papua dan Papua Barat. Namun menurut Safrizal, Untuk Klaster Papua dan Papua Barat pada 2018 belum ada yang mendapat penghargaan. Pasalnya hanya 1 daerah yang mengakses indeks inovasi daerah dan skor belum memenuhi nilai sebagai pemenang IGA.

Pada 2019, input data inovasi daerah akan diberikan waktu yang lebih panjang dan sosialisasi yang lebih banyak. Selama batas waktu, jaringan, sosialisasi yang sangat kurang menjadi alasan daerah tidak menginput data. Kemudian Safrizal menambahkan, data indeks inovasi sangat bermanfaat, dan Puslitbang Inovasi Daerah sangat

terbuka bagi siapa pun yang ingin mendapatkan data tersebut. “Untuk integrasi data kita juga menggandeng seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat membuat rencana aksi pembinaan inovasi daerah berdasarkan data-data yang telah terkumpul ini. Sehingga nantinya pembinaannya dapat terlaksana dengan sinergi dan tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Prioritas Nasional

Kassubid Potensi Inovasi Daerah, Danang Binuko menyampaikan, berdasarkan hasil laporan Global Innovation Index (GII) 2018 tentang inovasi, Indonesia menempati posisi ke-85 dari 126 negara dalam hal inovasi. Artinya, ini membuktikan ada tren peningkatan di daerah yang melakukan inovasi.

“Seperti yang dikatakan Mendagri tujuan inovasi daerah adalah memangkas biaya, jalur birokrasi yang panjang, dan waktu agar lebih ringkas. Inilah yang akan membuat daerah menjadi *Smart city* dan *Smart Regional* sebagai cikal bakal Pemerintah Indonesia yang *Smart Government*,” tuturnya.

Ia juga menerangkan, pembinaan inovasi daerah saat ini berfokus pada

penyempurnaan peta pembinaan, penyempurnaan rencana aksi, melakukan diseminasi dengan cara menyebarkan penerapan inovasi daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada daerah lain, dan melakukan replikasi yang menjadi prioritas nasional. BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendagri memiliki tujuh inovasi replikasi pelayanan yang akan dikembangkan seperti perizinan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, komoditi, DPRD, dan Administrasi Penduduk (Adminduk). BPP Kemendagri pada 2019 menargetkan 150 daerah replikasi.

“Inovasi daerah yang sukses direplikasi ke daerah lain, juga bisa diterapkan secara nasional oleh Kemendagri,” ujar Danang.

Meskipun tren peningkatan inovasi daerah 2018 meningkat, masih ada daerah yang sulit melakukan inovasi. Penyebabnya, BPP Daerah beranggapan kurang ada arahan dari pusat, dan minimnya peran dukungan *stakeholders*. Padahal, menurut Danang inisiator teretusnya inovasi daerah dimulai dari Kepala Daerah, Anggota Dewan Legislatif, Organisasi Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara daerah setempat, dan Kelompok masyarakat.

Danang berharap inovasi daerah yang sukses diimplementasikan dapat di replikasi untuk daerah lain, dan memberi manfaat bagi daerahnya, juga daerah lain.

■ GALUH CANDRA WISESA



GENJOT REALISASI KIA DAN AKTA KEMATIAN

Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan BPP Kemendagri, **Gatot Tri Laksono** menyampaikan, pada 2019 ini, terdapat 14 program dari Ditjen Dukcapil yang diajukan ke BPP Kemendagri untuk dibahas secara mendalam.

Adapun 14 program tersebut adalah; Pelayanan terintegrasi satu paket yaitu KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA; Pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT, RW; Perekaman dan pembuatan KTP-el yang tidak mengubah elemen data, dan boleh dibuat di luar domisili; Syarat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk percepatan akta kelahiran; Pembangunan ekosistem data dan dokumen kependudukan; Akta kelahiran online; Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan; Penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan (*Geografic Information System*); Dukcapil *Go Digital*; Pendirian program Diploma 4 Dukcapil; Tindakan afirmatif untuk kemudahan pelayanan pemilih pemula; dan pemberian identitas untuk semua KTP-el dan KIA.

Dari 14 program tersebut Gatot mengatakan, ada dua program yang menjadi perhatian yang bisa diimplementasikan pada 2019. Dua program itu ialah KIA dan Akta Kematian. Program tersebut sangat penting, pasalnya masih lemahnya perlindungan hak anak dalam pemenuhan hak konstitusional

warga negara yang berstatus anak, serta untuk pemutakhiran data penduduk yang lebih akurat.

Multifungsi KIA

Lebih jauh tentang KIA dan Akta Kematian dijelaskan oleh **Hari Prasetyo** dan **Febryan Denistya Perdana** Peneliti BPP Kemendagri. Hari Prasetyo mengatakan, KIA belum menjadi prioritas utama meskipun sudah dimulai sejak 2016. Minimnya evaluasi KIA dinilai menghambat fungsinya, sehingga kurang diminati oleh para orangtua yang ingin membuat KIA untuk anaknya. “Padahal, fungsi KIA akan diperluas tidak hanya identitas bagi seorang anak saja, tetapi juga untuk kebutuhan pelayanan publik bagi si anak. Kendala lainnya ialah soal anggaran. Pada 2018–2019 anggaran KIA dialihkan untuk KTP-el persiapan menjelang pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota mengalami kesulitan menginisiasi kerja sama karena tidak dibekali kemampuan negosiasi atau kemampuan pemasaran.

Lebih detil ia menjelaskan saat ini BPP Kemendagri melalui Bidang Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan sedang mengkaji ulang KIA.

Untuk mengetahui apa saja kekurangan implementasi KIA di daerah. Sebelumnya BPP Kemendagri sudah melakukan pengkajian yakni pada 2016, 2017, dan 2018 di wilayah yang sudah menerapkan KIA dan wilayah yang melaksanakan KIA secara mandiri



seperti Kota Malang, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Belitung. Hasil pengkajian menyimpulkan, KIA perlu fungsi tambahan sebagai daya tarik bagi masyarakat.

Fungsi tambahan itu adalah perlindungan, pendataan, dan pelayanan publik. Menurut Hari, perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Dengan adanya perlindungan terhadap anak, pemerintah mencegah aksi kriminalisasi kepada anak. “Semisal ada kejadian penculikan anak, polisi cukup memasukan nomor identitas si anak, maka polisi akan mendapat data lengkap si anak

hingga ke ciri fisiknya. Fungsi pendataan dimanfaatkan untuk pendaftaran sekolah, bimbingan belajar dan lain sebagainya. Jadi menggunakan *single* data, dan tidak perlu lagi membawa dokumen lainnya,” jelasnya.

Selanjutnya adalah fungsi pelayanan publik, di mana fungsi KIA untuk pelayanan publik akan lebih luas. KIA nantinya dapat digunakan sebagai kartu diskon bagi keperluan anak, misal pembelian buku dan berkunjung ke tempat wisata. “Pihak-pihak yang akan berhubungan dengan urusan pelayanan publik terhadap anak-anak, diharapkan dapat ikut menggaungkan pentingnya penggunaan KIA,” harap Hari.

Akta Kematian

Program selanjutnya yang menjadi fokus Bidang Dukcapil Puslitbang Adwil, Pemdes, Kependudukan BPP yang segera direalisasikan pada 2019 ini yaitu akta kematian. Febryan Denistya Perdana mengungkapkan, salah satu persoalan yang cukup pelik dalam administrasi kependudukan adalah pencatatan peristiwa kematian. Bagi pemerintah, data pencatatan kematian yang akurat berguna dalam berbagai urusan seperti Pemutakhiran Data pemilih Tetap (DPT) Pemilu, keakuratan pemberian bantuan sosial dan pendataan penduduk lainnya.

“Sampai saat ini cakupan kepemilikan akta kematian di Indonesia masih

rendah. Pada 2018 Ditjen Dukcapil mencatat baru 50% yang membuat akta kematian. Sementara pada 2022 diharuskan bisa 100%. Makanya, kami ingin lebih maksimal dalam kajian dan sosialisasi akta kematian pada tahun ini,” ungkap Denis.

Menurut Denis, upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengurus akta kematian sudah dilakukan melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). Meski begitu, dalam implementasinya masih terjadi praktik *moral hazard*, lemahnya dukungan dari komponen masyarakat, dan lemahnya dukungan *stakeholders* terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Untuk mengatasi persoalan itu, ia menyebutkan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya harus ada insentif berupa santunan kepada keluarga yang meninggal dari pemerintah daerah setempat yang mempersyaratkan akta kematian dari Disdukcapil. Kemudian ada komitmen dari instansi pemerintah di luar Disdukcapil dan swasta yang hanya menerima akta kematian sebagai syarat. Selanjutnya Pemberdayaan kepala lingkungannya turut berperan aktif dalam pelaporan peristiwa kependudukanarganya. Pemerintah juga harus meningkatkan pengetahuan masyarakat kegunaan akta kematian, pengadaan fasilitas fisik berupa kendaraan keliling yang dapat memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat untuk mengurus dokumen kependudukan. Serta syarat pembuatan semakin dipermudah, bebas biaya, dan pembuatan cepat, dan terakhir, inovasi dalam pelayanan adminduk atau sistem pelaporan harus dilakukan *online*.

“Saya berharap 2019 ini pembuatan akta kematian semakin meningkat. Hal ini demi kelancaran pencatatan kependudukan, terlebih menjelang pemilihan umum,” tutup Denis.

■ GALUH CANDRA WISESA

DORONG TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tahun 2018 lalu selain mengkaji sistem kerja sama pemerintah dengan swasta, Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri juga melaksanakan program untuk mendorong penyelenggaraan keuangan daerah yang lebih baik, indikasinya adalah transparan dan akuntabel. Lalu Pusat Litbang Pembangunan dan Keuda merumuskan indeks pengelolaan keuangan daerah.

Rendahnya kemampuan mengelola keuangan dan aset masih menjadi pekerjaan rumah sejumlah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Lemahnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban mengakibatkan munculnya indikasi korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan yang justru mereduksi upaya pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu, transformasi pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan krusial.

Atas dasar itulah, Pusat Litbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri pada 2018 merumuskan sebuah gagasan indeks pengelolaan keuangan daerah. Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri Horas Mauritz Panjaitan, beberapa waktu lalu mengatakan, indeks pengelolaan keuan-

gan daerah adalah gambaran kondisi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tiga faktor yaitu sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta kondisi keuangan.

“Pengukuran ketiga indikator itu, juga menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah pada 2016. Nah simulasi inilah yang akan memberikan gambaran pengelolaan keuangan, sehingga menjadi data pendukung wacana penyusunan Permendagri tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah nanti,” ucap Mauritz di BPP Kemendagri.

Mauritz mencontohkan, misalnya, penilaian sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan terhadap 34 provinsi. Metode pengukurannya mempertimbangkan; kesesuaian jumlah program dan nomenklatur antara dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD dan Kesesuaian pagu alokasi belanja antara dokumen RKPD dan APBD. Ukuran pagu tersebut meliputi program 6 urusan wajib mendasar seperti kesehatan, pendidikan, PU dan tata ruang, perumahan dan permukiman, sosial, dan linmas.

Pengukuran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tersebut kemudian menghasilkan kesimpu-



lan, 6 provinsi masuk kategori baik, 23 provinsi masuk dalam kategori perlu perbaikan, dan sisanya 5 provinsi berkategori sangat perlu perbaikan.

“6 provinsi berkategori baik di antaranya Jawa tengah, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur. Sedangkan yang termasuk dalam kategori sangat perlu perbaikan di antaranya Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara,” terang Mauritz.

Kategori kedua yang menjadi indikator indeks pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi pengelolaan keuangan. Salah satu hal yang paling sederhana untuk melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah sajian informasi dan dokumen pengelolaan keuangan pada masing-masing *website* resmi pemerintah daerah.

Untuk indikator transparansi pengelo-

laan keuangan, Mauritz mengatakan, Puslitbang Pembangunan dan Keuda bekerja sama dengan Maksigama Universitas Gajah Mada. “Kesimpulan dari transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah ternyata tidak cukup memberikan keterbukaan. Dari hasil pengukuran kita menemukan 6 provinsi masuk dalam kategori terbatas, 14 provinsi termasuk dalam kualifikasi minimal, sedangkan sisanya 14 provinsi masuk kategori sedikit,” jelasnya.

Indikator terakhir dalam indeks pengelolaan keuangan daerah adalah dengan mengukur indeks kondisi keuangan daerah. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan data LKPD pemerintah provinsi 2016 yang diambil dari BPK. Pengukuran ini juga dengan melihat tujuh dimensi pembentuk kondisi keuangan pemerintah seperti; Solvabilitas Jangka Pendek; Solvabilitas jangka panjang; Solvabilitas anggaran; Kemandirian Keuangan; Fleksibilitas

Keuangan; Solvabilitas layanan; dan Solvabilitas Operasional

Dari proses pengukuran kondisi keuangan daerah ditemukan hasil akhir di antaranya, 6 provinsi termasuk dalam kategori baik, 23 provinsi termasuk dalam kategori perlu perbaikan dan 5 provinsi sangat perlu perbaikan.

Enam provinsi dengan kondisi keuangan baik di antaranya DKI Jakarta, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Papua, Jawa Barat, dan Papua Barat. Sedangkan lima provinsi dengan kategori sangat perlu perbaikan adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat.

Mauritz berharap indeks pengelolaan keuangan yang sudah ditemukan hasilnya secara rinci ini, bisa menjadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Permendagri tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam penyusunan Permendagri tersebut, misalnya, perlu penambahan indikator dalam pengukuran indeks keuangan yang sebelumnya 7 indikator menjadi 8 indikator. Yaitu dengan menambahkan indikator Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Selain itu perlu penyederhanaan pengukuran pada masing-masing indikator, dalam pengukuran indeks kondisi keuangan. Selanjutnya dalam hal pembobotan, masing-masing dimensi dalam indikator pengukuran harus diubah seperti 30% untuk dimensi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, 40% untuk dimensi kondisi keuangan, dan 30% untuk dimensi transparansi pengelolaan keuangan. Rekomendasi dari simulasi pengukuran ini juga dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tutup Mauritz.

SAIDIRIFKY



ISU NASIONAL MASIH MENJADI PRIORITAS PENELITIAN

Tahun 2019 menjadi titik balik Puslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri untuk bekerja lebih fokus dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pada tahun lalu. Sikap fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas kajian dan program kegiatan yang akan dijalankan pada tahun ini. Terkait program, isu nasional nampaknya masih menjadi prioritas program yang akan dilaksanakan, tentu program tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari mitra kerja BPP Kemendagri. Harapan khusus tentu muncul dari Kepala Pusat Litbang Otda, Politik dan PUM Syabnikmat Nizam, agar para stafnya tidak terjebak pada program rutinitas, sehingga setiap pekerjaan bisa memberikan output dan manfaat yang jelas.

Pada 2018 lalu Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri menyelesaikan beberapa program kegiatan terkait isu nasional, di antaranya kajian pedoman penyusunan naskah akademik peraturan daerah; evaluasi kebijakan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah; strategi kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam memperkuat otonomi khusus; serta penilaian kelayakan partai politik melalui mekanisme akreditasi.

Kajian akreditasi parpol

Ditemui di ruangannya Januari 2019 lalu di BPP Kemendagri, Kepala Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri Syabnikmat Nizam memberikan penjelasan terkait program pusatnya pada 2018 lalu. Salah

satu yang menarik Media BPP adalah terkait akreditasi partai politik. “Banyak partai politik itu tidak efektif bagi sistem pemerintahan kita. Untuk itu kami mengusulkan adanya lembaga khusus untuk menilai studi kelayakan partai politik,” ucapnya mengawal pembicaraan.

Menurut Syabnikmat, partai politik yang banyak juga menjadi penyebab utama permasalahan yang sering muncul baik dalam pilkada maupun pemilu. Sebagai contoh, maraknya politik uang, kaderisasi yang cenderung elitis, tata kelola yang sarat oligarki, serta tidak berjalannya sistem partisipatif.

Permasalahan-permasalahan tersebut menurut Syabnikmat juga menjadi faktor permasalahan hukum di kalangan anggota parpol tidak terbendung. Tercatat, sejak 2018 lebih dari 100 anggota parpol berurusan dengan penegak hukum, dari mulai kasus tindak pidana



korupsi serta kasus immoral lainnya.

“UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol mengamanatkan pendidikan politik itu harus dilakukan oleh Parpol. Nah yang terjadi justru kan malah partai politiknya yang harus dididik. Parpol juga malah tidak punya andil besar bagi proses regenerasi kepemimpinan,” tuturnya.

Syabnikmat menyebutkan, hasil penelitian pusatnya menemukan penyebab kenapa parpol malah bertambah. Padahal, seharusnya berkurang. Menurutnya syarat pendirian parpol saat ini masih sangat sederhana dan terbilang mudah. Selain itu, verifikasi Parpol juga tidak ketat. Faktanya banyak parpol tidak melakukan tata kelola lembaganya dengan baik. Seperti masih banyaknya parpol yang tidak memiliki kantor di daerahnya. Bahkan menurut Syabnikmat, di tingkat kecamatan, kantor parpol hanya disewa satu tahun saja saat menjelang pemilu.

Masalah lainnya ada beberapa parpol

yang tidak memenuhi syarat, tetapi diloloskan setelah melakukan gugatan. Padahal dari hasil verifikasi pendaftaran parpol tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Untuk itu, menurut Syabnikmat penerapan akreditasi parpol mutlak diperlukan dan harus termuat dalam UU Parpol dan peraturan lainnya. “Yang lebih penting perlu ada pertemuan lebih lanjut antara Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, KPU, dan Bawaslu untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Ke mana urgensi dan rasionalitas penelitian ini sehingga harus menjadi sebuah regulasi,” ucap Syabnikmat.

Pilkada Papua dan Papua Barat

Selain penelitian akreditasi parpol, tahun lalu Puslitbang Otda, Politik, dan PUM juga melakukan kajian terkait penyelenggaraan Pilkada Papua dan Papua Barat dalam memperkuat otonomi khusus. Syabnikmat memberi alasan kenapa kajian tersebut penting

dilaksanakan. Menurutnya meski partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di Papua cukup tinggi, tetapi tak lepas dari konflik sosial dan politik, serta tidak merepresentasikan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Permasalahan lain adalah sistem *noken* yang tengah berlangsung lama juga disinyalasi tidak memberikan pendidikan politik. Sistem *noken* itu tidak lepas dari manipulasi. Sistem tersebut menurutnya bukannya merepresentasikan realitas ciri khas nilai-nilai budaya masyarakat lokal, namun justru ditunggangi aktor intelektual seperti kepala suku.

“Kita megevaluasi pelaksanaan pilkada langsung di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan hasilnya tidak efisien. Pertama, anggaran yang berasal dari APBD untuk pembiayaan Pilkada

cukup besar. Kemudian banyak ASN yang tidak netral, banyak penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Selain itu, penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu tidak cukup profesional,” terang Syabnikmat.

Terkait hal itu Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM menyarankan agar Pilkada di kedua daerah tersebut, dapat dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui DPR Papua, dengan mendapat rekomendasi dari MPR Papua. Hal ini menurut Syabnikmat sesuai dengan amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Tetapi jika memang pelaksanaan pilkada serentak melalui sistem pemungutan suara tetap dilaksanakan, maka Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan beberapa hal di antaranya, meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat Papua, serta memprioritaskan pembenahan data penduduk, seperti percepatan pelayanan perekaman KTP elektronik untuk menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu,” jelas Syabnikmat.

Syabnikmat berharap hasil-hasil kajian tahun lalu yang dilakukan pusat yang dipimpinnya bisa bermanfaat. Dan setiap rekomendasi yang diajukan bisa dipakai oleh *stakeholder* terkait, tidak terkecuali penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada tahun ini. Terakhir ia berharap agar kinerja puslitbang yang ia pimpin pada tahun ini bisa lebih baik dan menghasilkan keluaran yang jelas.

Menurut Syabnikmat kegiatan penelitian tahun ini juga tidak akan jauh dari isu-isu nasional terkait politik dan pemerintahan dalam negeri. Pusatnya sudah menyusun beberapa kegiatan seperti kajian aktual dan strategis. Namun terkait tema kajian itu, kepada Media BPP ia belum mau membicarkannya.

SAIDIRIFKY

LAPORAN UTAMA

MENGHIMPUN SARAN MERUMUSKAN PROGRAM

Forum Majelis Pertimbangan BPP Kemendagri yang dilaksanakan pada Desember 2018 lalu, memberikan gambaran utuh program kegiatan yang bisa diimplementasikan BPP Kemendagri. Beberapa usulan masing-masing komponen juga merupakan isu penting mengenai permasalahan pemerintahan dalam negeri, seperti kurangnya perhatian terhadap Binwas dan APIP hingga optimalisasi dana otonomi khusus. Dari semua isu penting untuk dilakukan kajian itu, mampukah BPP Kemendagri membuat gebrakan program seperti yang disarankan komponen, atau masih keukeuh pada rutinitas penelitian yang sama yang dilakukan setiap tahun, sambil berharap penelitian itu dimanfaatkan.



Sejak 2012 BPP Kemendagri membuat agenda reguler yakni forum Majelis Pertimbangan kelitbangan. Forum tersebut diadakan setiap satu tahun sekali, dengan tujuan mengoptimalkan tugas dan fungsi BPP dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Dalam agenda forum itu, setiap komponen memaparkan hasil pencapaian kerjanya selama satu tahun dan memberi penjelasan kepada BPP Kemendagri terkait persoalan yang belum bisa diselesaikan, dan meminta BPP Kemendagri mengkaji lebih dalam atas hal tersebut. Seluruh hal itu, dituangkan pada forum Majelis Pertimbangan BPP Kemendagri yang digelar pada 19 Desember – 2018, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Pada forum Majelis Pertimbangan, BPP Kemendagri menuai ragam apresiasi atas hasil capaian, penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan pada 2018. Dalam sambutannya Dodi Riyadmadji, Kepala BPP Kemendagri mengatakan, selain kegiatan kelitbangan, BPP juga melakukan kegiatan strategis lainnya, antara lain: penyusunan indeks inovasi daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah. Sesuai Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan yang meliputi prosedur kerja yang bertujuan agar lebih terstruktur, terencana dan dapat dikendalikan dengan baik.

Dodi menambahkan, BPP mempunyai fungsi yang strategis seiring dengan Perpres No 11 Tahun 2015, BPP mendapat penugasan di dalam fungsi penelitian dan pengembangan melalui pemerintahan dalam negeri dan menjadi fasilitator terkait inovasi



daerah dan fungsi litbang di pemerintah daerah. Menurutnya, peran dari komponen sangat diperlukan untuk memberi masukan isu strategis aktual kepada BPP. “Dari fungsi strategis itulah yang menjadi harapan kami, agar BPP mampu menyikapi kondisi yang aktual dan kondisi Kemendagri,” ucap Dodi.

Forum Majelis Pertimbangan tersebut dihadiri oleh masing-masing komponen di antaranya perwakilan dari Sekretaris Jenderal, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah, Dit-

jen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kepala BPP, Sekretaris BPP. Turut diundang pula, Rektor IPDN, Staf Ahli Politik Mendagri, Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, dan Biro Perencanaan.

Pada kesempatan itu Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo menyampaikan, dalam menghadapi dinamika terkini, Kemendagri membutuhkan keberadaan BPP untuk pengembangan kerangka dan juga

“**DIBUTUHKAN PERANAN APIP YANG BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL. LALU, LEMBAGA INI JUGA DAPAT MENDORONG PERANGKAT DAERAH LAIN MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN YANG ANDAL**”

fungsi Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) yang masih perlu diperhatikan. Menurutnya, setiap komponen harus memberi masukan dan saran untuk menjawab isu strategis sesuai bidang tugas di masing-masing komponen, karena di 2019 ada agenda bersama yang perlu di perhatikan sesuai bunyi Perpres No 2 Tahun 2015 yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJN) 2015 – 2019.

“Harus ada perhatian serius untuk Binwas apakah sudah tepat, atau masih ada hal lain yang perlu diperhatikan. Begitu juga, dengan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dari hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016, apakah sudah bisa

menyesuaikan kondisi riil atau masih tetap sama setelah direvisi peraturannya,”ujarnya.

Pada kesempatan yang lain Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menilai, keberadaan APIP sangatlah penting. Disisi lain, perlu penguatan terhadap lembaga Inspektorat. Menurut dia, selama kurun empat tahun salah satu prioritas membenahan tata kelola pemerintah daerah yang dilakukan adalah penguatan APIP. Inspektorat daerah bisa kuat bila aparat di dalamnya bisa independen, bukan lagi menjadi bawahan sekretaris daerah (Sekda). Dengan begitu, Inspektorat selaku aparat pengawas pemerintah tak lagi gamang, serta takut dievaluasi kepala daerah. Hasil pengawasan mereka pun menjadi lebih berkualitas.

“Permasalahan korupsi di daerah, merupakan fenomena gunung es yang tidak dapat diselesaikan secara parsial dan reaktif. Oleh karenanya, dibutuhkan peranan APIP yang berintegritas dan profesional. Lalu, lembaga ini juga dapat mendorong perangkat daerah lain membangun sistem pengendalian yang andal,” jelas Tjahjo.

Usulan dari komponen Kemendagri

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno mengusulkan, peran dan keberadaan BPP Kemendagri harus lebih diperhatikan. Pasalnya, suatu inovasi kebijakan lahir dari proses penelitian dan implementasinya melalui pengembangan, di dalam proses itu tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit agar kegiatan kelitbangan lebih efektif. Di sisi lain, Ia meminta SDM (Sumber Daya Manusia) di BPP Kemendagri ditingkatkan kualitas kinerjanya.

Selain Didik, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro menambahkan, saat ini ada beberapa yang menjadi fokus BPP Kemendagri dan Kemendagri. Pertama, paradig-

ma hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di zaman yang terus berkembang, di mana masyarakat saat ini harus sejajar dengan pemerintah. Ia menggambarkan, pada era orde baru terjadi disparitas yang lebar antara pemerintah dan masyarakat.

“Sekarang ini posisi itu terbalik. Rakyat berada di atas Pemerintah, artinya Pemerintah diakui dan dipercaya oleh rakyat sebagai pelayannya. Hal ini, yang perlu dikaji, bagaimana menjaga paradigma tersebut dan menanggapi perubahan paradigma yang akan datang antara hubungan Pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.

Suhajar mengatakan, Kemendagri memunyai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) mengawal politik desentralisasi di dalam negeri, maka penelitian tentang politik desentralisasi asimetrik masih sangat diperlukan dalam melahirkan suatu kebijakan, mengingat 2019 adalah tahun politik. “Sekarang ini eranya desentralisasi, tidak mungkin lagi negara besar melakukan sentralisasi. Di samping itu, sentralistik yang dilakukan harus ada batasannya, ditambah menjelang Pemilu banyak isu-isu miring terkait Pemerintahan. Karenanya, perlu penelitian lebih dalam lagi tentang politik desentralisasi asimetrik untuk merawat kebhinekaan dalam NKRI,” cetus Suhajar.

Fokus yang ketiga ialah, penguatan program smart city dengan penerapan sistem *Internet of Things* (IoT) yang bersinergi dengan daerah. Hal ini harus diimplementasikan untuk memudahkan pelayanan ke masyarakat.

Selain Binwas dan APIP yang menjadi sorotan Kemendagri, Tim Media BPP Kemendagri juga menyoro beberapa pembahasan yang menjadi isu terkini, yang dikemukakan oleh para pejabat Kemendagri mewakili bidangnya masing-masing di forum Majelis Pertimbangan tersebut.

Ada sejumlah pembahasan yang dikemukakan dari masing-masing



komponen, seperti yang di utarakan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Desa, Nata Irawan. Ia menyatakan, masih minimnya pengawasan tata kelola Desa, padahal anggaran untuk tata kelola tersebut cukup besar. APIP Provinsi, Kabupaten dan Kota dinilai belum optimal dalam menjalankan pengawasan internal.

Lalu dari pihak Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah beberapa persoalan yang dihadapi di ranah kebidangannya, pihaknya menyebutkan, perlu adanya kajian terkait perluasan persoalan tentang DPMPSTP (Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) karena satu-satunya kelembagaan daerah yang mengimplementasikan keinginan Presiden, untuk percepatan dalam membuka usaha. Akan tetapi, dalam bidang perizinan kerap terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada pejabat yang bersangkutan. “Perlu ditekankan, bahwa Dinas teknis bukan mengurus perizinan tetapi menegakkan perizinan,” tegasnya.

Berbeda dengan Dirjen Adwil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menyrankan perlunya optimalisasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik, dan pencatatan kependudukan berbasis digital. Ditambah, pemanfaatan kependudukan dengan kerjasama instansi pengguna, serta perlunya tindakan afirmatif untuk kemudahan pelayanan di timur Indonesia, juga optimalisasi pemberian identitas di semua usia.

Usulan selanjutnya disampaikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), otoritasnya meminta BPP Kemendagri untuk ikut terlibat mengkaji terkait triumvirat yang

kerap membenturkan kerja dan program Kemendagri terhadap Kementerian lain dan pengkajian mendalam tentang LSPDN dan LSP Pemerintah Daerah.

Selain itu, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menginginkan BPP Kemendagri membuat problem solving terkait belum optimalnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah karena belum tuntasnya Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Pemerintahan Umum, dan perlu adanya tandingan terhadap UU No 25 Tahun 2009 tentang Kebijakan Publik.

Hal inilah yang menyebabkan terputusnya sinergi antar regulasi yang belum terlaksana sehingga mempersulit keharmonisan Pemerintahan Umum. Dari persoalan yang dihadapi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, pihaknya memberikan apresiasi kepada BPP Kemendagri atas pencapaian penelitian dan pengembangan terhadap lembaganya.

Dalam diskusi forum Majelis Pertimbangan BPP Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda), juga menyampaikan persoalannya. Tantangan yang dihadapi oleh Ditjen Bangda yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk program membangun rumah masyarakat penghasilan rendah perlu dilakukan pengkajian mendalam.

Sedangkan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) menyoro maraknya pejabat daerah yang terkena OTT oleh KPK. Ditjen Otda juga meminta rumusan metode dalam pengaplikasiannya saat menjelang Pilkada serentak pada 2024, dan kajian yang mendalam terhadap moratorium daerah otonom baru.

Biro perencanaan juga akan menyusun arah program kebijakan tahun 2020-2024 dalam mendukung pembuatan Rencana Strategi (Renstra) Kemendagri, dan Rencana Kerja (Renja) Litbang tahun 2019 agar bisa menjadi masukan bagi kajian BPP Kemendagri dan kajian yang mendalam untuk mendukung Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas).

Dari hasil pemaparan peta kajian setiap komponen Kemendagri di forum Majelis Pertimbangan. Nantinya, hasil pemaparan akan dibahas dan dikaji secara internal oleh BPP Kemendagri untuk menemukan solusi terbaik dan diajukan ke setiap komponen Kemendagri untuk dijadikan regulasi.

■ GALUH CANDRA WISESA

SOLUSI ALTERNATIF DARI DANA INSENTIF

Pada 2019 ini, Pemerintah Pusat menaruh perhatian serius pada penelitian. Tidak tanggung-tanggung Pemerintah mengucurkan dana abadi penelitian mencapai Rp 900 miliar. Di sisi lain Dana Insentif Daerah (DID) untuk inovasi di daerah juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 8,5 triliun pada 2018, menjadi 10 triliun pada 2019. Dana tersebut diharapkan menjadi alternatif serta modal penting untuk memaksimalkan peran BPP dan pemerintah daerah untuk pengembangan inovasi di daerah.

Salah satu yang menjadi fokus utama forum Sinergitas Pembinaan Pelaksanaan Inovasi Daerah yang dihadiri para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) pada Desember 2018 lalu, adalah pembahasan mengenai pendanaan penelitian dan pengembangan, serta Dana Insentif Daerah (DID) yang diusulkan untuk pengembangan inovasi daerah. Dana tersebut sekaligus menjadi peluang penguatan kelibangan pada 2019, khususnya untuk inovasi di daerah.

Inovasi di daerah sebenarnya sudah diperkuat dengan hadirnya PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. PP tersebut juga membahas mengenai pendanaan yang dibebankan dalam APBD. Namun setahun berjalannya PP tersebut, pengalokasian anggaran inovasi daerah baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat dirasa masih kurang.

Fakta tersebut diakui juga oleh beberapa perwakilan dari K/L, salah satunya oleh Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji. "Menciptakan suatu inovasi itu perlu dana yang besar, karena itu DID kita dorong sebagai salah satu pendukung pendanaan dalam hal

penelitian dan pengembangan dan inovasi di daerah," ucap Dodi.

Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk memberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik, kesehatan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada 2018 anggaran DID sebesar Rp 8,5 triliun, sedangkan 2019 meningkat menjadi Rp 10 triliun.

Menurut Dodi, DID memiliki kaitan erat dengan inovasi daerah. Ia mencontohkan pelayanan publik di era digitalisasi, era di mana pelayanan publik tidak lepas dari sistem informasi dan teknologi. Teknologi tersebut bisa memudahkan pelayanan. Membangun teknologi juga menggunakan dana yang tidak sedikit. Apalagi jika teknologi yang digunakan semakin canggih.

Kemudahan pelayanan dengan teknologi juga dicontohkan dengan bagaimana BPP Kemendagri yang

telah membangun sebuah sistem dan aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan, lebih jauh lagi bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kembali Dodi menjelaskan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kementerian Dalam Negeri juga memberikan motivasi seperti mem penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) yang diperuntukan bagi pemerintah daerah yang melakukan inovasi dan kinerja yang lebih baik. Inilah yang menjadi alasan dasar inovasi daerah harus didukung dari DID.

Karena itu pada pembahasan di forum tersebut, inovasi diharapkan sebagai indikator DID, begitu juga dengan pemberian penghargaan IGA kepada

pemerintah daerah atas inovasinya.

Selain untuk mendorong alokasi DID menjadi sumber dana untuk penelitian dan pengembangan inovasi daerah pada 2019. Pemerintah Pusat juga mengucurkan dana lain untuk bidang penelitian, yang nantinya dapat digunakan untuk inovasi daerah.

Dana abadi penelitian

Suksesnya pengelolaan beasiswa pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang setiap tahun digelontorkan pemerintah sebesar Rp 55 triliun, bisa menjadi cermin pemerintah dalam pengelolaan dana abadi penelitian.

Bercermin akan hal itu, pemerintah akan mengucurkan dana untuk pene-

litian yang disebut dana abadi penelitian.

Dikutip dari beberapa sumber pemberitaan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, Pemerintah sedang berfokus pada pengembangan riset. Skema ini dilakukan berkaca pada kesuksesan dana abadi beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sekarang mengelola dana abadi beasiswa sebesar Rp 55 triliun.

Ia mengatakan, berdasarkan penelitian Bank Dunia, kualitas SDM Indonesia hanya ada peringkat 87 dari 157 negara. Oleh karena itu, perlu perbaikan yang menyeluruh meningkatkan SDM. Kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh dunia akademik maupun de-

ngan swasta, terus ditingkatkan dalam upaya memperbaiki kualitas SDM di Indonesia.

"Investasi di *human capital* bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan kolaborasi dari semua *stakeholders*," kata dia.

Dana abadi penelitian sebesar Rp 990 miliar tercantum dalam UU No 12 Tahun 2018, Pasal 21 ayat 3 huruf b tentang APBN 2019. Dana abadi merupakan *point* pembeda dibanding anggaran tahun 2018 lalu. Dalam beleid itu, total anggaran pendidikan pada 2019 dianggarkan sebesar Rp 492 triliun atau 20 persen dari total anggaran. Sementara dana pengembangan pendidikan sebanyak Rp 20 triliun.

■ GALUH CANDRA WISESA



SINERGI MEMBINA INOVASI

Desember 2018 lalu, BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendagri mengadakan forum Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dengan tema Sinergitas Pembinaan Pelaksanaan Inovasi Daerah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam acara tersebut Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, **Saf-rizal** menjelaskan, selain ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pembinaan dan pelaksanaan inovasi daerah, acara tersebut juga merumuskan langkah-langkah sinergitas pembinaan pelaksanaan inovasi di daerah, melalui perumusan regulasi, serta peningkatan kapasitas perangkat BPP Daerah dalam mengembangkan inovasi daerah.

“Adanya forum ini kita ingin tahu suara dari Kementerian/Lembaga dari luar Kemendagri terkait program dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan inovasi daerah, karena itu mereka kita undang,” ungkapnya.

Adapun pejabat K/L yang hadir dalam agenda tersebut di antaranya, Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy S Prawiradinata,

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan BPPT Muhammad Imanuddin, Direktur Sistem Inovasi Kementekdikti Ophirtus Sumule, Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT Iwan Sudrajat, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDM Aparatur LAN Seno Hartono, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kementekdikti Sadjuga, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhunami, Kasubdit Hibah DD dan DID Kementerian Keuangan Muhammad Zainuddin.

Pada kesempatan itu Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji berujar, salah satu indikator penentu kemajuan suatu bangsa ialah inovasi, khususnya inovasi yang muncul dari daerah.

“Untuk pembinaan pelaksanaan inovasi daerah BPP sudah memfasilitasinya melalui regulasi PP 38 Tahun 2017 dan Permendagri No 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan, juga Insentif Inovasi Daerah. Lalu, pengembangan replikasi layanan pemerintahan melalui Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) sebagai aplikasi layanan publik. Saat ini sudah 50 Kepala Daerah yang komitmen melaksanakan aplikasi tersebut. Kemudian, tidak kalah pentingnya harus ada penyusunan indeks inovasi daerah,” jelas Dodi.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata, inovasi tidak cukup dengan sekadar membenahi regulasi, namun perlu dengan sistemnya. Contohnya, mendorong daya saing dan pelayanan dasar di daerah, dengan cara pengelolaan pen-



danaan yang baik, membuat perencanaan jangka panjang dan membuat sistem perkotaan dengan baik.

Di sisi lain Ruddy juga mengakui, sinergi inovasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu strategi kebijakan mengatasi ketimpangan antar daerah.

Sementara itu, Direktur Sistem Inovasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Ristek Dikti, Ophirtus Sumule berharap sinergitas pembinaan dan pelaksanaan inovasi daerah harus mendatangkan manfaat ekonomi daerah, juga sosial budaya.

Inovasi menurut Ophir harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang perlu diperhatikan lagi ialah memperkuat BPP Daerah dengan menambahkan

peneliti. Ia juga mengatakan perlunya pemerintah memetakan daya saing daerah.

“Ekosistem yang perlu dibangun untuk menumbuhkan inovasi ialah berpartner, keterbukaan, inklusif, kreativitas, sinergi, fleksibilitas dan *leadership*. Pemerintah juga harus bisa memetakan daya saing daerah, mengidentifikasi teknologi, sumber daya daerah yang menjadi produk unggulan daerah. Selain itu yang tidak kalah penting adalah dan K/L yang mempunyai data terkait inovasi harus bersinergi menjadikannya satu data,”ujarnya.

Selain membahas sinergitas inovasi, dalam forum tersebut juga dibahas kebijakan nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan inovasi daerah, seperti UU No 18 Tahun 2002 tentang

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di mana revisi UU tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan.

Kemudian selain UU No 18 Tahun 2002, juga dibahas UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

“**EKOSISTEM YANG PERLU DIBANGUN UNTUK MENUMBUHKAN INOVASI IALAH BERPARTNER, KETERBUKAAN, INKLUSIF, KREATIVITAS, SINERGI, FLEKSIBILITAS DAN LEADERSHIP.**”

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kedepujian Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Imanuddin menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pembinaan dan pelaksanaan inovasi daerah. Menurutnya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memunculkan inovasi. Di antaranya dengan melakukan kompetisi inovasi baru.

Hal itu menurut Imanuddin sebagai cara mempromosikan inovasi. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan mengirim hasil inovasi tersebut ke instansi yang membutuhkan. Kemudian agar inovasi bisa berkelanjutan, menurut Imanuddin perlu payung hukum, program, dan anggarannya.

“Dari hasil kajian KemenPAN-RB, ada tiga hal yang berpengaruh besar bagi kemajuan inovasi yaitu *policy* atau kebijakan, *leadership* atau kepemimpinan dan birokrasi,” cetusnya.

Menurut Imanuddin, Kemendagri harus harus menjadi *leading sector* terhadap inovasi dengan adanya PP No 38 Tahun 2017 tersebut. Pada masa mendatang, harus ada peraturan atau Surat Keputusan (SK) bersama antar K/L yang terkait dalam rangka pembinaan inovasi secara bersinergi satu sama lain,” harapnya.

Kesepakatan Bersama

Secara singkat forum tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, sinkronisasi



“**TIDAK KALAH PENTING, KEMENTERIAN KEUANGAN JUGA PERLU MENJADIKAN INDEKS INOVASI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR DALAM PEMBERIAN DANA INSENTIF DAERAH**

dan sinergitas regulasi/kebijakan nasional pelaksanaan inovasi daerah. Para peserta sepakat, UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 38 Tahun 2017 menjadi pemimpin atau acuan dalam mendorong inovasi daerah.

Kedua, sinkronisasi dan sinergi program pelaksanaan pembinaan inovasi daerah, yang memuat delapan poin penting. Yang salah satu poinnya adalah perlunya setiap K/L menyusun beberapa definisi operasional utama yang berhubungan dengan sistem inovasi nasional dan daerah. Definisi operasional yang dimaksud seperti ekosistem inovasi, sistem inovasi daerah menjadi dasar pelaksanaan inovasi sesuai tugas dan fungsi yang ada.

Safrizal juga menyimpulkan beberapa poin selain perlunya definisi operasional. Misalnya terkait rencana aksi pembinaan inovasi daerah yang harus dipersiapkan oleh masing-masing K/L.

Penyusunan rencana aksi, menurut Safrizal juga akan diperkuat dengan indeks inovasi daerah. Untuk itu, Safrizal berharap setiap K/L bisa memberikan kontribusi dalam memperkuat dan mantapkan indikator penyusunan indeks inovasi daerah yang sudah mulai disusun

pada tahun 2018.

Safrizal juga berharap dorongan dan koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, dan bersinergi dengan Kemendagri untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah agar termuat dalam RKP dan RKPD.

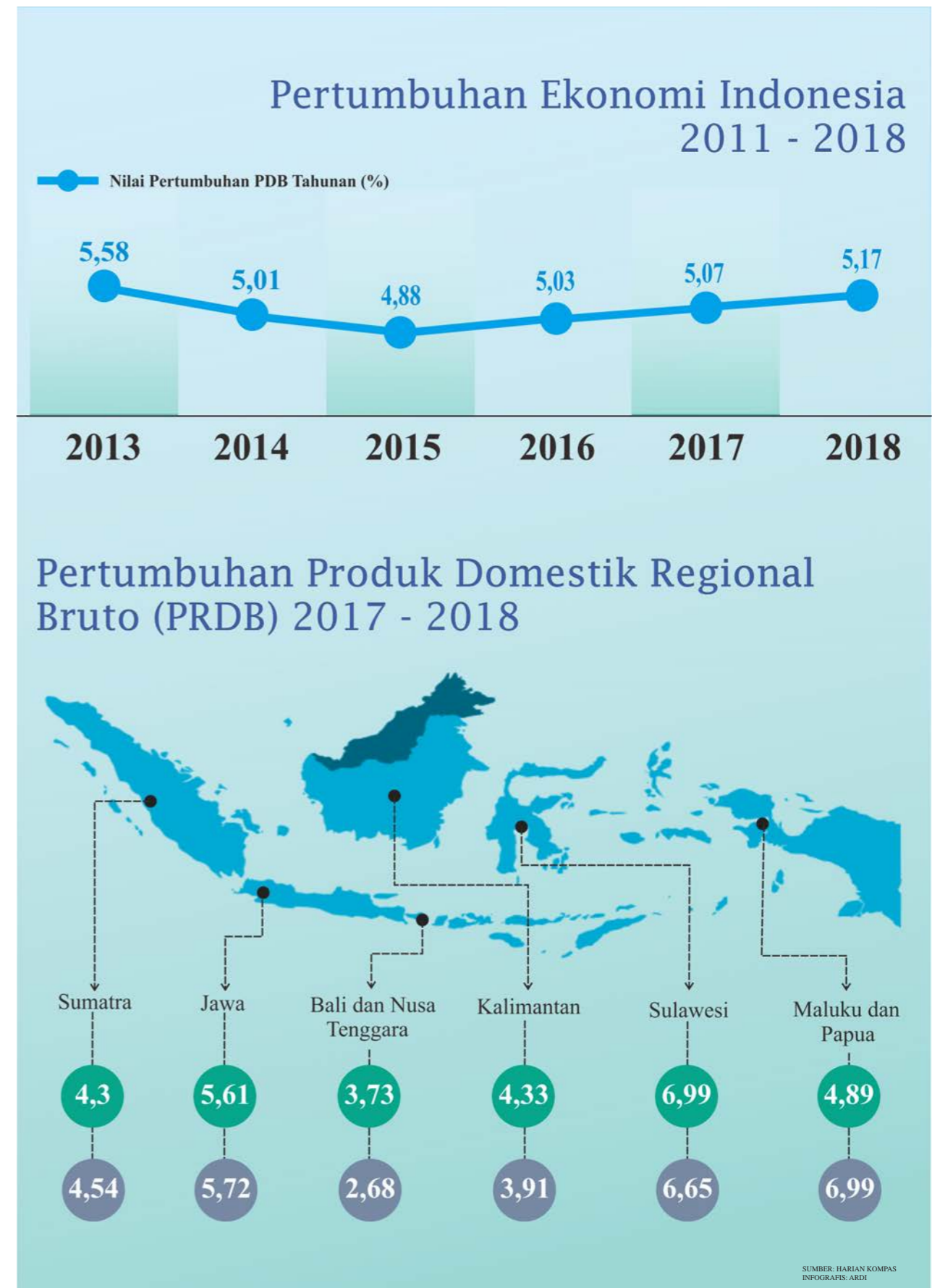
“Selain itu, dalam hal membangun komitmen kepala daerah dan implementasi kebijakan inovasi daerah, perlu adanya program *leadership* dalam membangun Inovasi daerah yang perlu disusun secara terkoordinasi oleh lintas K/L pemangku kepentingan. Tidak kalah penting, Kementerian Keuangan juga perlu menjadikan indeks inovasi daerah sebagai salah satu indikator dalam pemberian dana insentif daerah,” terang Syafrizal.

Ketiga, sinkronisasi dan sinergi penyusunan dokumen perencanaan kelitbang yang memuat dua poin kesepakatan, seperti menyatukan berbagai dokumen perencanaan kelitbang yang harus disiapkan oleh daerah. Kemudian, dokumen tersebut disatukan dalam satu dokumen perencanaan kelitbang di mana sistematisanya disusun secara sinergi untuk mewakili kepentingan lintas K/L.

Terakhir sinergi penguatan dan pemberdayaan organisasi perangkat BPP Daerah, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pembinaan inovasi daerah kita harus menyepakati, organisasi perangkat BPP Daerah sebagai unsur yang mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengimplementasikan kebijakan inovasi daerah. Juga, masing-masing K/L agar mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi jaringan mitra kerjanya di daerah untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat litbang daerah, berkenaan inisiatif inovasi daerah dan tugas fungsi setiap OPD, sesuai amanat PP No 38 Tahun 2017,” tutup Syafrizal.

■ GALUH CANDRA WISESA

Infografis





ALIRAN air terjun Niagara, New York membeku, karena suhu dibawah 0 derajat celcius. Terlihat dari Kanada, Ontario, 22 Januari 2019. Amerika Serikat memang tengah dilanda suhu ekstrem hingga mencapai minus 55 derajat celcius. FOTO/ REUTERS/Moe Doiron

BPP DAERAH

BPPID PROVINSI SULAWESI TENGAH MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI PASCA-BENCANA

Melimpahnya sumber daya alam tidak menjamin perekonomian suatu negara tumbuh dengan cepat. Terutama jika sumber daya alam tersebut tidak terbarukan seperti hasil tambang. Venezuela adalah salah satu contoh negara dengan 95 persen bergantung pada sumber daya alam negara yang mengalami krisis ekonomi terparah di dunia. Bekaca dari situ, pemerintah kemudian mendorong agar setiap daerah melakukan inovasi dan tidak bergantung pada hasil bumi. Potensi sumber daya alam yang melimpah bisa menjadi anugerah sekaligus “kutukan” di tengah perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian.

Paradoks tersebut menjadi catatan bagi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (BPPID) Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan masukan dan cara-cara terbaik agar sumber daya alam, khususnya komoditas berbasis unggulan daerah dan terbarukan seperti hasil-hasil pertanian dan perkebunan, tidak punah begitu saja. Kelapa akhirnya menjadi pilihan BPPID Sulteng untuk dilakukan pembibitan.

Pembibitan kelapa

Kepala BPPID Sulteng Adidjoyo Dauda mengatakan, pada tahun ini BPPID Sulteng akan melakukan penelitian pembibitan kelapa. Pembibitan tersebut nantinya akan dilakukan dalam sebuah laboratorium kultur jaringan.

“Laboratorium ini sempat mati beberapa tahun lalu. Karena besarnya potensi kelapa di Sulteng, kami merasa perlu melakukan pembibitan dan penelitian yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan nantinya. Kami juga akan perhatikan varietas unggul yang sudah ada dengan varietas produksi tinggi,” katanya.

Sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, Sulawesi Tengah menjadi sentra tanaman kelapa di Indonesia. Penyebaran kelapa meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo una-una, Toli-Toli, dan Palu. Berdasarkan data statistik, luas areal kelapa pada 2017 mencapai 214.000 ha dengan produksi 189.570 ton per tahun.



POTO: [HTTPS://HARIANRIAU.CO/ASSETS/BERITA/ORIGINAL/13040945585-2.JPG](https://harianriau.co/assets/berita/original/13040945585-2.JPG)

Sulawesi Tengah juga tercatat daerah pengekspor kelapa segar. Eksport Sulteng untuk kelapa segar mencapai 1.200 ton, atau sekira 0,6 persen dari total produksi. Pada periode Januari-Februari 2017, total ekspor kelapa Sulteng mencapai 273 juta dolar AS. Besarnya potensi tersebut, kelapa menjadi primadona bagi pertumbuhan ekonomi Sulteng.

Di sisi lain, komoditas unggulan daerah tak cukup kuat menghadapi persaingan global. Akibat maraknya komoditas ekspor, atau tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Mengantisipasi keadaan tersebut, pembibitan kelapa mutlak harus dilakukan. Pasalnya, selain menjadi bahan baku utama, kelapa segar selalu dibutuhkan pasar.

Dengan pembibitan itu, produksi kelapa di Sulteng diharapkan terus meningkat. Sehingga pada masa mendatang, perdagangan kelapa tidak hanya kelapa segar, tetapi juga hasil industri prosesing. Dengan begitu diharapkan, produksi kelapa menjadi salah satu solusi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Pengembangan coklat

Selain mengembangkan bibit kelapa, pada 2019, BPPID juga berencana mengembangkan kemasan produksi kakao. Pasalnya Sulteng merupakan provinsi penghasil kakao/coklat terbesar di Sulawesi. Menurut Dauda, BPPID akan berfokus pada pengembangan olahan seperti desain pengemasan produk.

Cokelat atau kakao juga menjadi salah satu komoditas unggulan Sulteng. Tahun lalu, pemerintah meresmikan rumah coklat di Sulteng, sebagai wujud bentuk perhatian mendukung program hilirisasi pengolahan biji kakao men-

jadi produk coklat. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan bisa mendorong ekonomi masyarakat. "Karena kakao adalah produk unggulan daerah, melalui rumah coklat ini, kita akan berkontribusi melalui pemasaran dan pengemasan olahan kakao menjadi coklat," ucapnya.

Provinsi Sulteng memiliki 200 ribu hektare lahan kakao yang tersebar dengan produksi mencapai 150 ribu ton per tahun. Meskipun memiliki luas dan produksi kakao cukup besar dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi, namun hasil panen masih belum banyak memberikan nilai tambah bagi petani maupun pendapatan asli daerah. Musababnya karena coklat masih diekspor dalam bentuk mentah.

Selain harganya murah, kakao juga biasanya berkualitas rendah karena mengalami proses fermentasi sebelum dijual. Untuk itu, BPPID Sulteng mencoba mendorong petani dan masyarakat yang tregerak dalam industri kecil menengah yang khusus memproduksi coklat. "Nantinya coklat akan lebih banyak diproduksi di Sulteng dengan kemasan yang lebih menarik," tutur Adidjoyo.

Selain coklat, hal lain yang akan dikembangkan oleh BPPID pada tahun ini di bidang pertanian adalah pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian, serta uji coba pengembangan mie dengan bahan baku sagu, jagung (non-terigu).

Menurut Dauda, program yang digagas BPPID Sulteng pada tahun ini akan lebih fokus pada pemulihan ekonomi pasca-bencana. Gempa besar dan tsunami yang menghantam Palu dan sekitarnya beberapa waktu lalu menyebabkan perekonomian lumpuh. Untuk itu fokus pemerintah Sulteng saat ini adalah



memulihkan kembali perekonomian yang terkena dampak bencana.

Ketika ditanya program penelitian yang berkaitan dengan kebencanaan, Dauda mengatakan, sejauh ini belum ada program spesifik yang digagas BPPID terkait dengan bencana. "Bencana yang ada masih ditangani secara nasional. Dan yang paling mendesak untuk saat ini sebenarnya adalah penyediaan hunian sementara untuk korban bencana. Untuk BPP sendiri belum spesifik, tetapi lebih kepada mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," kata Dauda.

Eksistensi BPP

Dauda merupakan Kepala Badan yang baru menjabat kurang dari 2 tahun di

BPPID. Ia mengaku masih awam tentang penelitian dan pengembangan. Ia berpandangan, lembaga BPPID Sulteng tidak memiliki posisi yang cukup kuat di antara SKPD yang lain. Menurutnya beban pekerjaan BPPID adalah yang paling besar di antara SKPD lainnya. Pasalnya selain mengurus penelitian dan pengembangan juga masih ada 5 urusan lainnya seperti evaluasi kebijakan, perekayasaan, dan sebagainya.

Kenyataan tersebut semakin parah ketika jumlah peneliti yang ada di BPPID juga hanya tersisa 1 orang. Padahal idealnya, BPPID memiliki lebih dari 4 peneliti. "BPPID adalah lembaga

dengan tipe A, memiliki 4 bidang dan 1 Sekretariat Badan. Jadi ya idealnya memiliki fungsional peneliti tidak hanya satu. Selain itu urusan kita juga harus diperjelas, jangan terlalu besar, jujur kita keberatan kalau harus menerapkan yang 7 urusan dalam UU itu," keluh Dauda.

Menurut Dauda, masalah tersebut juga dialami oleh hampir semua BPP di daerah. Tentu ini menjadi tugas besar BPP Kemendagri sebagai lembaga koordinator lembaga BPP di daerah. Menurutnya BPP Kemendagri perlu merumuskan dan memperjelas fungsi BPP yang ada di daerah. Dengan begitu BPP Daerah tidak kesulitan da-

lam menentukan program yang dilaksanakan.

Yang lebih penting, tambah Dauda, adalah program prioritas nasional BPP Kemendagri harus dibagikan ke BPP Daerah. Sehingga terjalin kerja sama riset yang bermanfaat dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di BPP Daerah.

"Misalnya penelitian keberhasilan pemilu di daerah, kan tinggal koordinasi dengan BPP Daerah. kegiatan-kegiatan semacam itulah, yang akan membuat BPP di daerah eksis, sekalian mendorong peneliti di daerah juga semakin berkembang," terangnya.

■ SAIDI RIFKY

Bau Bau, Sulawesi Tenggara Pelangi Negeri di Perut Bumi

Mengunjungi Baubau, kota yang berdiri kokoh di Pulau Buton, seperti mengunjungi sebuah wilayah yang memberi warna peradaban bangsa. Baubau seperti surga di timur Indonesia. Selain keindahannya yang memesona, Baubau ibarat pelangi yang memiliki berbagai tradisi dan budaya, serta kuliner yang sarat makna. Di sanalah nilai-nilai universal berpadu dengan lokalitas.

Pukul 06.30 kami (*Media BPP*) mendarat di Bandara Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara. 9 menit berlalu, kami tiba di kota Baubau. Perjalanan kami menuju Baubau bertepatan dengan hari jadi Baubau yang ke-477. Sekaligus ulang tahun kota Baubau ke-17 sebagai daerah otonom. Warna warni terlihat di lapangan Kotamara yang menghadap Pantai Kamali. Siang itu rencananya Walikota Baubau akan menutup serangkaian acara yang telah dilangsungkan beberapa hari sebelumnya. Acara penutupan rencananya akan dimeriahkan dengan acara “*pa-kande-kandea*” di siang hari, dan akan ditutup oleh penampilan Band Gigi pada malam hari.

Pukul 13.00, kemeriahan mulai terlihat di Kotamara. Tiga panggung besar yang dipersiapkan mulai ramai dipenuhi masyarakat dan tamu undangan. Setiap kelompok menyajikan satu talang (nampan besar berisi makanan), berjejer rapi dengan puluhan gadis suku Buton yang menunggu setiap talang. Riasan di wajah plus busana adat *kombo wolio* yang mereka kenakan membuat teriknya siang sedikit berkurang, terutama bagi para tamu yang sedang lapar.

Walikota memimpin acara. Pada hitungan ketiga, tutup talang dibuka. Para gadis Buton menawarkan sejumlah hidangan yang didominasi *seafood*. Berbagai jenis makanan tersaji seperti bulu babi bakar, kepiting asam manis, ikan goreng campur kelapa parut, opor ayam, dan lain-lain. Inilah *pakande-kandea* atau makan-makan dalam bahasa Wolio (Buton) itu memang sudah dinanti para tamu yang datang siang itu.

Selain *seafood* beberapa makanan yang sepertinya wajib ada



di acara ini juga disajikan. Makanan tersebut menjadi ciri khas Baubau seperti waje (wajik), cucur, baruasa (ketela dicampur kelapa parut dan gula), dan bholu (kue bolu), sertasup ikan atau parende. Lalu ada sayur konduru, sejenis labu yang dimasak dengan santan, dicampur dengan kelapa parut.

Bu Jufri adalah penyaji masakan tersebut. Ia mewakili SD Pulau Makassar, Buton. Ia menuturkan sejarah *pakande-kandea*. Menurut *pakande-kandea* dulunya merupakan tradisi untuk menyambut pulang para laskar kesultanan Buton dari medan perang. Jika para laskar tersebut kembali dengan membawa kemenangan, *pakande-kandea* bisa lebih meriah lagi.

“Tradisi ini sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para prajurit. Kalau saat ini, *pakande-kandea* adalah bentuk kebersamaan masyarakat Buton yang diwujudkan dalam pesta makan,” kata Bu Jufri.

Acara puncak dilaksanakan pada malam hari, rangkaian acara dimulai dari pentas seni, pidato Walikota hingga ditutup dengan penampilan band Gigi. Semarak peringatan hari jadi Baubau ke-477 dan HUT Kota Baubau ke-17 tahun ini begitu meriah.

Keunikan Baubau

Sebagai wilayah penting kesultanan Buton. Baubau menjadi saksi sejarah peradaban masa lampau di kawasan timur Indonesia. Mustafa Zain, masyarakat asli Buton sekaligus Kepala BPP Kota Baubau, mengatakan, Buton memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya masyarakat Buton percaya, jika Buton berarti perut bumi, yang berasal dari kata “Butun” (bahasa arab). “Buton juga berperan sebagai mata rantai perekonomian laut nusantara di masa itu. Baubau menjadi persinggahan pedagang dari Arab, Tiongkok, dan Eropa yang membawa rempah-rempah dari Maluku,” tuturnya.

Salah satu saksi bisu kejayaan Kesultanan Buton adalah masih kokohnya benteng keraton yang dibangun di



masa lalu. Benteng itu menjadi bukti kejayaan maritim Kesultanan Buton. Pada 2006 benteng keraton mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Guinness Book of Record sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekira 23,375 hektar. Selain menjadi benteng terluas di dunia, benteng keraton Buton memiliki bentuk unik yang terbuat dari batu kapur.

Ketika memasuki kompleks keraton

Kesultanan Buton, Nuansa Islam sangat kental terasa. Masjid dan tempat pertemuan yang masih dipertahankan masih berdiri kokoh, sebuah jangkar kapal, dan tiang bendera dari kayu purba juga masih dirawat dengan baik. Yang paling menarik adalah sebuah tempat ritual khusus untuk mengucapkan sumpah raja atau sultan juga masih dijaga dengan baik.

Seorang pemuda bernama Rizal, pengurus kompleks keraton menuturkan sejarah. Ia mempraktikkan ketika

seorang raja atau sultan mengambil sumpah jabatan, dengan hati-hati ia menginjakkan kakinya ke sebuah batu berlubang yang disediakan untuk sumpah jabatan. Meski zaman sudah jauh berbeda, namun praktik prosesi tersebut masih terasa sakral.

Menjunjung tinggi toleransi

Rizal menceritakan keunikan pengangkatan pemimpin di kesultanan Buton.

Berbeda dengan pengangkatan raja pada umumnya yang berdasar nasab, demokrasi di kesultanan Buton dipilih secara aklamasi.

“Raja atau Sultan tidak harus keturunan raja, tetapi orang yang memiliki ciri-ciri dari sejak kecil yang bisa dilihat oleh pemimpin spiritual, meski dari satu rumpun keluarga. Mereka juga harus menepati janji. Salah satunya tidak boleh selingkuh serta berhubungan dengan istri mereka selama menjabat menjadi raja. Jika terbukti melanggar, maka hukuman mati menantinya,” ucap Rizal.

Belum puas mengupas sejarah Kesultanan Buton di Keraton, oleh Pak Jufri (Sekban Kota Baubau) kami diajak mengunjungi Pulau Makassar, sebuah pulau tidak jauh dari Baubau. Kami mengunjungi sebuah tempat, di mana seorang raja dibuang dan dihukum mati karena melanggar sumpahnya.

Pak Jufri juga banyak bercerita tentang keunikan masyarakat Buton khususnya Baubau, yang menjunjung tinggi toleransi. Ia membandingkan dengan Jawa yang kerap bersitegang karena urusan agama. Menurutnya masyarakat Buton bisa menjadi contoh kehidupan masyarakat yang tidak pernah terpancing dengan politisasi agama.

Ia mencontohkan ketika kerusuhan yang dipicu permasalahan agama pecah di Ambon, banyak orang Ambon mencari suaka ke Baubau. “Mereka banyak yang lari ke sini. Malah siapa pun yang datang ke sini dilindungi. Tidak melihat latar belakang mereka,” terangnya.

Surga di timur Indonesia

Kami juga diajak mengunjungi Pantai Nirwana yang keindahannya menakjubkan, hingga Bukit Wantiro, tempat bersantai di senja hari, sambil menyaksikan matahari terbenam dibalik

Pulau Makassar. Pantai Nirwana berada kira-kira setengah jam dari pusat Kota. Hamparan pasir putih dengan air laut jernih kehijauan dan kebiruan menambah suasana takjub kami. Sore dan pagi hari adalah waktu yang tepat mengunjunginya. Karena selain cuacanya tidak terlalu panas, juga bisa menyaksikan matahari terbenam.

Bukit Wantiro juga tidak kalah bagus. Sambil menikmati pisang goreng dan sarabba (semacam wedang jahe), pengunjung juga dimanjakkan dengan laut yang tenang, matahari terbenam, dan menyaksikan cahaya lampu di seberang pulau. Sebenarnya banyak tempat wisata yang mulai dikembangkan oleh pemerintah di sekitaran kota, yang cocok untuk bersantai dan menikmati

suasana malam. Misalnya di sepanjang Pantai Kamali yang penuh dengan meja-meja dan kursi untuk menikmati suasana malam hari.

Untuk menikmati keindahan, Baubau adalah kota yang lengkap. Tidak hanya menikmati suasana pantai, tetapi juga memiliki spot-spot terbaik menyaksikan kota dari ketinggian. Selain kompleks Benteng Keraton juga ada Palagimata, sebuah tempat di dataran tinggi di kompleks pemerintahan. Di lokasi ini juga lengkap dengan tugu ekor naga yang menjulang, dan menjadi lokasi berswafoto ria.

Baubau dikenal juga dengan komoditas utamanya adalah jambu mete. Di sepanjang jalan di Baubau pohon jambu mete banyak tumbuh. Namun sayang, Oktober bukan musim panen jambu mete. Untuk bijinya sebagai buah tangan kita tidak kesulitan mendapatkan. Tetapi karena belum musim, harga yang ditawarkan masih cukup mahal.

■ SAIDI RIFKY

LEBIH DEKAT**MUHAMMAD WILDAN, DIREKTUR CISFORM****RISRET GURU AGAMA ISLAM UNTUK MENCEGAH PAHAM RADIKAL**

Merebaknya isu radikalisme dan berkembangnya ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila, membuat Muhammad Wildan melalui pusat studi CISForm tergugah untuk melakukan penelitian radikalisme di sektor Pendidikan, dengan judul Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia

Keahliannya dalam studi Islam modern Indonesia dibuktikan dengan beberapa karya tentang Islam politik dan radikalisme. Keahliannya itu membawa Muhammad Wildan menjadi research fellow Center for Near Middle Eastern Studies (CNMS) di Phillip University di Marburg Jerman. Perhatiannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia, mengajak ia terlibat dalam sejumlah penelitian tentang Islam di Indonesia.

“Sebagai orang Islam saya merasa tergugah dan menjadi tanggung jawab moral, penelitian dan artikel tentang radikalisme dan intoleransi yang saya tulis, paling tidak saya dapat meluruskan ajaran Islam sebagaimana Islam *rahmatan lil alamin* yang penuh kasih sayang,”ucapnya.

Selain kerap melakukan penelitian, pria yang akrab disapa Wildan ini, juga rajin menulis artikel yang membahas keislaman di Tanah Air. Saat ini Wildan menjadi dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan aktif di lembaga penelitian Center for The Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Yogyakarta sebagai Direktur.

CISForm sudah berdiri sejak 2006. dalam kurun sepuluh tahun terakhir, CISForm berfokus pada penelitian isu-isu intoleransi dan radikalisme. Baru-baru ini Wildan beserta Tim peneliti CISForm bekerja sama dengan PPIM UIN Jakarta meneliti sejauh mana kesiapan dan ketahanan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Di mana yang menjadi fokus penelitiannya adalah pejabat, dosen dan mahasiswa di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Hasil penelitian itu



kemudian diberi tajuk *Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia*. “Riset ini lebih mengafirmasi riset-riset PPIM UIN Jakarta sebelumnya yakni pada 2017-2018, yang menyatakan ada masalah pada guru agama di sekolah umum/agama, banyak yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Oleh karena itulah maka penelitian di tinggal hulu ini perlu dilakukan,”ungkap Wildan.

Hasil penelitiannya di 18 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menyimpulkan, adanya keterkaitan antara peran guru dan tumbuh suburnya intoleransi dan radikalisme di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. CISForm mencatat, sebanyak 41,6% mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama (PAI) Islam berpandangan pemerintah Indonesia adalah *thaghut* (tidak Islami) dan berpandangan, Islam

hanya dapat tegak dengan sistem khilafah. Juga, sebanyak 27,4% mahasiswa memiliki pandangan boleh menggunakan kekerasan dalam membela agama. Pada level dosen PAI ada 14,2% setuju Islam harus ditegakkan dengan negara Islam, dan 16,5% setuju menggunakan kekerasan dalam membela agama.

“Guru itu adalah insan pedagogis yang melaksanakan aktivitas kebangsaan, tetapi dari hasil riset kami ada angka yang menunjukkan kebalikannya atau cenderung bertolak belakang dengan dasar negara,”katanya.

Hasil penelitian Wildan didasari oleh teori Michael W Apple yang menyatakan, kurikulum pendidikan yang berlaku merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Artinya, sekolah bagian dari sistem negara yang bisa menyebarkan ideologi Negara. Untuk memperkuat keabsahan penelitiannya, ia menggunakan teknik purposive di mana pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

“Potensi penyebaran paham intoleran dan radikal dalam sistem produksi guru agama relatif besar melalui sistem produksi guru agama yang banyak celahnya tersebut, lalu yang menjadi kekhawatiran kami adalah penyusupan radikalisme tersebut atau ideologi yang berbenturan dengan ideologi negara,”jelasnya.

Wildan juga menegaskan, hasil riset ini masih pada tahap kecenderungan, bukan mendukung khilafah. Namun, penelitian ini tidak bisa juga dianggap remeh karena sifatnya adalah perhatian dan peringatan bagi pemerintah agar lebih memerhatikan sektor pendidikan.

Menurutnya ada beberapa aspek yang membuat (calon) guru agama Islam itu kurang profesional atau tidak berperan sebagaimana mestinya. di antaranya, 32,9% mahasiswa Program Studi PAI di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTAI) berasal dari SMA/SMK umum yang tidak mempunyai dasar pengetahuan ilmu agama yang cukup. Kemudian, dari sisi rekrutmen, kurang selektifnya PTAI dalam menerima calon mahasiswa baru yang mengambil jurusan guru agama.

Di sisi lain, kurikulum PAI masih lebih dominan pada aspek pedagogis dibanding aspek profesionalnya. Akibatnya mahasiswa kurang menguasai secara keilmuan ketika menjadi guru agama di sekolah kelak. Selanjutnya, masih relatif sedikit dosen yang bisa berbahasa Arab dengan baik, khususnya dalam membaca teks-teks Arab sebagai sumber primer. Alhasil dosen tidak belajar pada sumber resmi Islam, dan hanya dari internet. “Tidak dimungkiri dari hasil riset kami dosen tersebut mempunyai paham yang sama atas apa yang mereka baca di internet,”terangnya.

Aspek selanjutnya, Ia mengungkapkan, mahasiswa pada semester 5 dan 7 yang menjadi calon guru agama Islam, ternyata masih banyak yang kurang menguasai bahasa Arab,

baik membaca maupun menulis. Semakin parah ketika organisasi-organisasi di kampus sudah disusupi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Wildan, sistem khilafah bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), padahal hukum-hukum yang ada di Indonesia juga banyak yang berlandaskan pada ajaran Islam, dan itu sudah cukup dibanding harus mengubah ke sistem khilafah. Ia menambahkan, harus ada penelitian lanjutan terkait hal tersebut, agar penelitiannya bisa lebih komprehensif. Nantinya, hasil penelitian akan dibukukan dan disampaikan kepada Kementerian Agama (Kemendagri) dan pihak-pihak terkait. “Dari hasil penelitian ini, kita harapkan menjadi kontribusi positif untuk arah ke depan yang lebih baik,”harapnya.

Cegah paham radikal

Untuk mencegah merebaknya paham radikalisme dan intoleransi di sektor pendidikan, menurut Wildan beberapa celah kelemahan Prodi PAI di atas harus dibenahi, baik itu dari segi input-rekrutmen, kurikulum, dosen, maupun lingkungan kampus. Beberapa PTKI yang sudah menyadari kelemahan dan tantangan radikalisme itu melakukan berbagai kegiatan tambahan seperti penambahan penguasaan bahasa, kajian Islam intensif dan juga cara berpikir yang kritis.

Selain itu, Wildan menyatakan, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan seperti perlu pendalaman pelajaran kewarganegaraan atau Pancasila di sektor pendidikan. Dari lima sila itulah yang diterima menjadi dasar oleh para penganut semua agama di Indonesia. Disisi lain, pendalaman Pancasila perlu kajian ulang agar tidak terlalu normatif. “Harus ada kurikulum pembelajaran bermuatan pencegahan radikalisme dan intoleransi bagi semua guru mata pelajaran. Karena mencegah hal-hal tersebut adalah tugas semua guru. Sektor pendidikan adalah garda terdepan dalam mencegah radikalisme dan intoleransi” cetusnya.

Selain Pancasila, paradigma Islam *wasathiyah* (moderat) juga dianggap penting, karena negara dan agama merupakan model relasi yang mempunyai hubungan selaras, keduanya saling menempatkan diri di mana agama dan negara dan saling membutuhkan secara timbal balik. Hal itu, bisa mencegah paham liberal, intoleransi dan radikalisme. Ia meminta, agar para pelaku Islam moderat lebih berperan aktif dalam berdakwah ataupun memberi pelajaran agama Islam.

Menurutnya penelitian bersama CISForm adalah bentuk kontribusi kepada negara. CISForm juga tidak sekadar menyajikan penelitian lewat tulisan, tetapi juga mengaplikasikan dalam bentuk animasi, komik, dan pelatihan. Sehingga, penelitian tersebut dapat diimplementasikan dengan mudah oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar. “Dengan memodernisasi hasil penelitian, kami berharap masyarakat semakin tertarik dan khususnya pelajar dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan,”ujarnya

■ GALUH CANDRA WISESA

Pola Makan Pengaruhi Tingkat Depresi Anak

Hampir semua dokter atau ahli gizi mengatakan sayur adalah asupan sehat untuk tubuh. Tak dimungkiri, kandungan vitamin dan mineral di dalamnya memang berefek baik untuk tubuh. Konsumsi sayuran secara teratur sangatlah penting untuk kesehatan dan perkembangan anak-anak dan remaja. Menyantap sayuran berwarna pun diklaim dapat mengontrol suasana hati sehingga mencegah tubuh agar tidak stres atau depresi.

Meski demikian, nyatanya tak semua anak-anak senang mengonsumsi sayuran. Bahkan, 20% anak-anak dan remaja di dunia mengalami depresi akibat kurangnya mengonsumsi sayuran.

Baru-baru ini, penelitian Mami Tanaka dan Kenji Hashimoto tentang pola diet yang diterbitkan oleh jurnal internasional PLOS One, jurnal sains dan kedokteran menyebutkan siswa sekolah menengah atas memiliki gejala depresi yang lebih tinggi daripada siswa sekolah menengah pertama. Secara umum, perkiraan prevalensi depresi menunjukkan bahwa remaja (sekira 13-18 tahun) dan dewasa muda (sekitar 19-26 tahun) cenderung memiliki gejala depresi yang lebih tinggi daripada anak-anak sekolah (sekitar 7-12 tahun).

Penelitian Tanaka dan Hashimoto dikaitkan dengan gejala depresi sekitar 441 siswa sekolah menengah pertama dan 417 siswa sekolah menengah atas. Skala Depresi Studi Epidemiologis Pusat (CES-D) digunakan untuk mengukur gejala depresi partisipan. Mereka menyurvei pola konsumsi sara-

pan para peserta, serta pola makanan umum mereka (daging, ikan, sayuran hijau dan kuning, susu dan produk susu, dan buah-buahan), menggunakan kuesioner laporan diri.

“Untuk menguji hubungan antara konsumsi makanan dan tekanan mental pada remaja. Pertama, kami memeriksa apakah konsumsi sarapan secara teratur dikaitkan dengan gejala depresi pada siswa SMP dan SMA di Jepang. Kedua, kami memeriksa apakah pola diet tertentu (mis., Daging, ikan, tabel vege hijau dan kuning, produk susu dan susu, dan buah-buahan) dikaitkan dengan gejala depresi pada siswa SMP dan SMA,” tulis penelitian tersebut.

Tinjauan sistemik dan meta-analisis dari hubungan antara pola diet dan depresi menunjukkan bahwa asupan buah-buahan, sayuran, ikan, dan biji-bijian yang tinggi dapat dikaitkan dengan penurunan risiko depresi. Sebuah meta-analisis yang lebih baru menunjukkan bahwa asupan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, minyak zaitun, produk susu rendah lemak, dan antioksidan yang tinggi ditambah dengan asupan makanan hewani yang rendah, dapat dikaitkan dengan penurunan risiko depresi.

Sebaliknya, pola makan yang ditandai dengan konsumsi tinggi daging merah dan/atau olahan, biji-bijian olahan, permen, produk susu tinggi lemak, mentega, kentang, dan saus lemak tinggi ditambah dengan asupan buah dan sayuran yang rendah, dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi. Karena itu, pola makan yang sehat dapat mengurangi risiko depresi.

“Terlepas dari keterbatasan ini, penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi sarapan dan sistem diet memiliki dampak besar pada gejala depresi remaja. Khususnya, konsumsi sayuran hijau dan peran menurunkan gejala depresi remaja,” tulis penelitian tersebut.

Meskipun demikian, harus dicatat bahwa faktor-faktor lain juga dapat memengaruhi hubungan antara konsumsi sarapan yang teratur dan tekanan mental pada remaja.

■ NUR'AINI

BIOFASE, INOVASI SEDOTAN RAMAH LINGKUNGAN DARI BIJI ALPUKAT

Tragedi ditemukannya biota laut seperti ikan paus dan penyu yang mati di perairan Indonesia beberapa waktu lalu, membuat kekhawatiran sejumlah pihak. Bukan tanpa sebab, isi perut hewan laut tersebut penuh dengan sampah plastik.

Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.

Atas dasar itu sejumlah pihak mulai mengampanyekan bahaya penggunaan sampah plastik. Tak terkecuali Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, yang melarang penggunaan wadah plastik untuk minuman dan makanan di Kantor Kemendagri. Ia mengatakan, imbauan tersebut diberikan karena permasalahan sampah plastik sudah mengkhawatirkan sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak.

Sadar bahaya penggunaan plastik tersebut ditangkap oleh sejumlah perusahaan untuk mengubah produk berbahan plastik menjadi ramah lingkungan. Dikutip dari teknologi.id, baru-baru ini, sebuah perusahaan yang berbasis di Morelia, Meksiko, membuat sedotan ramah lingkungan yang dapat terbiodegradasi dari limbah agroindustri.

Bisnis ini menggunakan biji alpukat untuk membuat alat makan dan sedotan yang mengandung 70 persen konten biomassa. Produk ini sangat kuat, cocok untuk makanan panas dan dingin, produk ini adalah yang pertama dibuat dari sumber yang sepenuhnya terbarukan dan

berkelanjutan. Produk tersebut diberi nama Biofase.

Meksiko menghasilkan 300.000 pon alpukat, atau sekitar 50 persen dari pasokan dunia. BIOFASE menggunakan 15 ton biji alpukat sehari untuk memasuki pasar global untuk bioplastik yang diperkirakan bernilai \$ 5,8 miliar pada tahun 2021, menurut *Bioplastics News*.

Teknologi plastik yang berasal dari alpukat mulai dikembangkan pada tahun 2012 oleh Scott Mungia, yang sedang mempelajari teknik kimia pada saat itu dan mencari cara untuk memerangi polusi plastik. Dia menguji sifat-sifat bahan baku seperti mangga dan biji sapote mamey, buah krem dan manis yang berasal dari Meksiko.

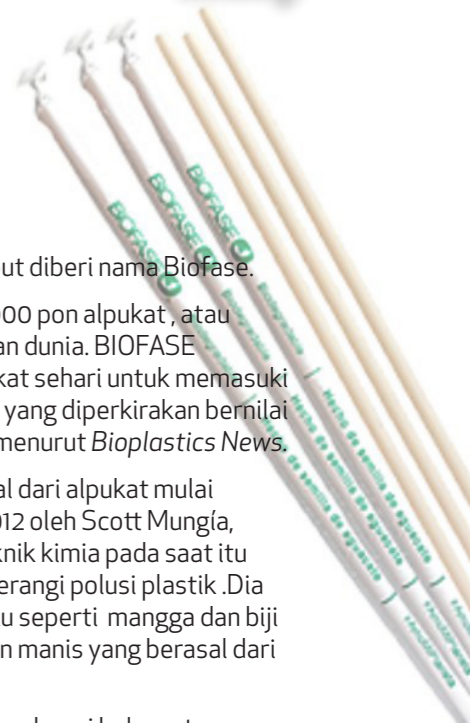
Setelah memutuskan alpukat sebagai bahan utama, Mungia menghabiskan 1,5 tahun mencari cara untuk mengekstrak senyawa molekuler dari biji alpukat. Dari hasil ekstraksi kemudian didapat biopolimer, yang ke dapat dicetak menjadi berbagai produk.

Peralatan makan dari biji alpukat ini dapat terurai. Hanya membutuhkan waktu 240 hari saja setelah pemakaian dan terpapar dengan unsur lain atau terkubur di dalam tanah.

Proses penguraian akan lebih cepat dibanding botol plastik yang membutuhkan waktu 450 tahun untuk terurai. Sedangkan, kantong plastik membutuhkan waktu 10 hingga 1.000 tahun untuk rusak.

Dengan tim yang terdiri dari 14 karyawan, BIOFASE memproduksi 130 ton produk plastik biodegradable di pabrik Morelia setiap bulan. Pada bulan November, perusahaan berencana untuk membuka pabrik dengan kapasitas 700 ton per bulan.

■ SAIDI RIFKY



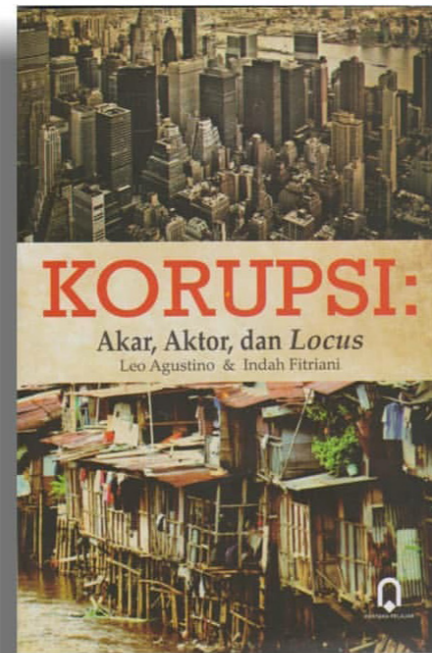
KORUPSI, DARI AKAR HINGGA LOKUS

Cita-cita menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan yang nyatanya masih jauh dari harapan. Alih-alih memberantas melalui pendirian lembaga anti-rasuah, korupsi justru makin berkembang. Buku ini membuka mata penulis, bahwa korupsi semakin gencar terjadi dari aktor hingga lokusnya. Penyebabnya pun semakin beragam. KPK pun ternyata belum cukup ampuh memberantas praktik culus politisi dan pegawai instansi. Melalui buku ini Leo Agustiono dan Indah Fitriani tidak hanya membedah akar, aktor, dan locus korupsi, tetapi juga membuka mata pembaca betapa berbahayanya korupsi bagi masa depan demokrasi.

Penyuri berdasi, itulah istilah yang disematkan masyarakat kepada para rasuah atau koruptor. Penyuri berdasi yang mencuri uang negara, dengan status dan jabatan yang digunakannya, seperti tidak ada habisnya, permasalahan yang telah berlangsung lama ini tak kunjung usai. Para Koruptor seperti kehilangan nalar untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara wajar sehingga mereka harus melacurkan diri sebagai makelar proyek, broker keadilan, penerima gratifikasi, dan lainnya. Malah terkadang para perasuah itu tidak malu-malu untuk menetapkan tarif guna memuluskan pencairan dana. Para koruptor juga kerap kali menyalahgunakan kekuasaannya di pemerintahan. Sering kali oleh para koruptor terkekuasaan di pemerintahan disalahgunakan. Tidak sedikit pejabat menyalahgunakan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi. Tidak memeperdulikan bagaimana seharusnya dana yang

yang dicurinya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara.

Setelah terjadinya penangkapan-penangkapan yang dilakukan kepada para koruptor tersebut, mengapa tidak ada efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi? Apakah kondisi ini menandai, korupsi merupakan cacat bawaan para politisi? Leo Agustino & Indah Fitriani dalam buku ini menyimpulkan, berdasarkan temuan di lapangan dan pemberitaan media, ada beberapa hal yang dapat diuraikan. Pertama, masalah lemahnya akuntabilitas pejabat publik termasuk para politisi dalam mengelola urusan publik, yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kedua, faktor kultural. Dalam budaya timur ada "kebiasaan memberi hadiah" hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal korupsi, memberi hadiah dalam budaya timur merupakan hal yang biasa untuk menghormati orang lain. Ketiga,



KORUPSI: AKAR, AKTOR DAN LOKUS

Penulis: Leo Agustino
& Indah Fitriani

Penerbit: Pustaka Pelajar
(Anggota IKAPI)

Cetak : Juni 2017

Tebal : 220 hlm

ISBN : 928-602-229-751-2

Harga : Rp 45.000

lemahnya institusionalisasi palembagaan politik. Faktor ini menjelaskan, korupsi akan terus terjadi dan menjadi bahaya laten jika proses palembagaan politik belum terjadi (hlm. 11-17).

Leo dan Indah dalam buku ini mengupas secara detail tentang fenomena korupsi, ia memaparkan bagaimana para koruptor dengan secara beringas memperkaya diri sendiri dengan uang rakyat. Leo dan Indah juga membahas tiga hal penting terkait korupsi, yaitu akar, aktor dan locus. Akar, yaitu berkaitan dengan diri pelaku korupsi atau koruptor, bagaimana ketidakpuasan terhadap apa yang telah didapatkan sehingga mencari jalan lain untuk memenuhi kehidupan yang konsumtif, memakan dana tidak sedikit guna memenuhi gaya hidup yang mewah. Akar juga termasuk bagaimana cara seseorang untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat memperolehi jabatan di pemerintahan.

Selanjutnya aktor dan locus. Aktor ialah pelaku di masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Aktor tidak hanya bergerak sendiri, namun juga berkelompok untuk melakukan korupsi, yang sering kita dengar sebagai korupsi berjamaah. Sementara itu, locus yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan yang berada ditingkat mana saja, seperti ditingkat kementerian, kepala daerah, parlemen baik pusat maupun daerah, partai politik dan petinggi TNI/Polri.

Penulis mengungkapkan segala keresaannya ke dalam bukunya, dengan mengungkapkan segala fakta-fakta hukum yang telah terjadi, dengan bahasa tulisan yang mudah dipahami. Meskipun isu mengenai korupsi telah banyak diangkat akan tetapi penulis mampu menyajikannya dengan sudut pandang yang berbeda. Buku ini juga membahas lebih mendalam terkait praktik korupsi di beberapa sektor, seperti politik, birokrasi, hingga rekrutmen CPNS atau CASN. Penulis mengungkapkan celah-celah perbuatan para elit saat

melakukan korupsi.

Buku ini juga menceritakan korupsi dalam dunia politik, yang disebabkan dari ongkos politik yang mahal, baik untuk menduduki jabatan politis pemerintahan maupun jabatan legislatif di parlemen. Untuk mencapai itu semua mereka berusaha mencari dana.

Dana yang mereka kumpulkan dapat berasal dari pinjaman kerabat ataupun sponsor dari pengusaha-pengusaha yang tentunya akan mengambil keuntungan saat elite politik yang didukungnya berhasil memangku ja-

“

LEMAHNYA AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK TERMASUK PARA POLITISI DALAM MENGELOLA URUSAN PUBLIK, YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI

batan. Penulis juga mencontohkan ketika para koruptor yang sudah memiliki jabatan penting, dan memiliki wacana mengembalikan dana kampanye. Salah satunya adalah dengan membantu para pengusaha yang mensponsori kampanye saat pemilihan untuk membantu memuluskan proyeknya di pemerintahan, meminta imbalan atas dilancarkannya pencairan dana pada daerah-daerah.

Penulis juga menyoroti celah korupsi lainnya seperti Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah. Beberapa contoh korupsi tersebut juga sering kali menimpa para pejabat maupun pegawai PNS. Salah satu contoh kasus yang sempat ramai adalah kasus jual beli PSU (Pemilihan Suara Ulang) oleh Ketua MK, Akil Mochtar. Sebagai ketua MK dalam konteks pilkada, Akil memunyai kekuasaan untuk menentukan apakah suatu pemilihan perlu diulang atau tidak, maka melalui celah itulah Akil memperjualbelikan kuasanya pada calon-calon kepala daerah yang kalah bersaing dalam Pilkada (hlm.127).

Buku yang ditulis oleh Leo dan Indah juga tidak lepas dari beberapa kekurangan. Seperti tidak menguraikan kelemahan atau kriminalisasi yang terjadi di lembaga anti-rasuah (KPK). Padahal elaborasi mengenai hal ini sangat menarik. Sebab banyak elite yang berkepentingan berusaha mengecilkan KPK. Banyak intrik dan muslihat licik para aktor dari lembaga atau partai tertentu yang berusaha menghentikan kinerja KPK. Beberapa kasus yang terjadi kepada pegawainya pun seharusnya menjadi salah satu contoh pemberantasan korupsi di Indonesia yang masih setengah hati. Terkait KPK buku ini juga belum terlalu kritis, misalnya, terkait sejumlah putusan MK yang dinilai menghambat pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, beberapa putusan MK memutuskan pelarangan jaksa mengajukan PK (peninjauan kembali) hingga memperluas ranah praperadilan, termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Akan tetapi secara keseluruhan topik yang penulis angkat sangatlah bagus dan dapat menambah pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa sebagai bahan bacaan dan dapat dijadikan referensi bagi guru maupun dosen sebagai bahan ajar. Dari buku ini dapatlah dipelajari, akar, aktor, dan locus sangatlah variatif.

■ SITI MUNTAMAH



**PREMAN
PENSIUN**

Sutradara: Aris Nugraha
Pemain: Epy Kusnandar,
 Tya Arifin,
 Soraya Rasyid,
 Andra Manihot,
 Dedi Moch Jamasari,
 Deny Firdaus,
 Ica Naga,
Skenario: Aris Nugraha
Produksi: MNC Pictures
Tayang: 17 Januari 2018



Apa yang Dilakukan Preman Ketika Pensiun?

Film *Preman Pensiun* bukanlah remake dari sinetron yang pernah tayang disalah satu stasiun tv swasta, melainkan lanjutan cerita dari sinetron itu sendiri yang diangkat kelayar lebar. Film yang diproduksi oleh MNC Pictures ini kembali menunjuk Aris Nugraha sebagai sutradara seperti di serialnya yang tayang pada 2015 lalu. Selain sebagai pengobat rindu untuk penggemarnya, film *Preman Pensiun* juga didedikasikan untuk mengenang almarhum Didi Petet yang merupakan tokoh sentral dalam serial TV-nya. Berdasarkan penuturan Aris Nugraha, cerita preman pensiun memang telah usai pada season ketiga. Kemudian film yang diangkat kelayar lebar ini merupakan lanjutan cerita dari serial-tv preman pensiun, sehingga para pemain film *Preman Pensiun* tidaklah jauh berbeda dengan serial-tv-nya. Mulai dari Kang Mus, Kinanti (Tya Arifin), Imas (Soraya Rasyid), Gobang (Dedi Moch Jamasari), hingga duo preman seram

nan menggemaskan, Murad (Deny Firdaus) dan Pipit (Ica Naga) (kincir.com).

Penonton yang belum menyaksikan serial tv-nya, mungkin akan sedikit kebingung mengenai kelanjutan ceritanya, akan tetapi film ini merupakan sebuah kisah yang baru sehingga bagi yang tidak menyaksikan edisi serialnya di tv tetap dapat menikmati jalan cerita film tersebut.

"Kita dipertemukan oleh bisnis. Bisnis yang oleh Kang Bahar disebut sebagai bisnis yang bagus, tapi bukan bisnis yang baik. Bisnis yang sudah lama ada, jauh sebelum Kang Bahar ada di dalamnya, dan masih tetap akan ada sampai jauh setelah kita meninggalkannya. Kita buktikan pada Kang Bahar yang sudah tenang di sana, di sini kita punya bisnis yang bagus dan juga bisnis yang baik."

Kalimat diatas merupakan kalimat penutup pada eposede terakhir serial tv *Preman Pensiun*. Untuk membuktikan kepada Kang Bahar (Dedi Petet), para anak buah dapat

menjalani kehidupan dengan berbisnis bagus dan juga baik. Akhirnya Kang Mus mengajak anak buahnya untuk berhenti dari Profesinya sebagai Preman.

Pada awal filmnya, penonton disajikan dengan adegan *flash back* ketika Kang Bahar (Didi Petet) menyerahkan posisinya sebagai pemimpin preman kepada Kang Mus. Adegan tersebut tidak hanya menjelaskan plot kepada penonton awam, namun juga membawa memori tersendiri bagi penggemar setia serialnya di tv.

Film ini mengisahkan tentang bagaimana kelanjutan kehidupan Kang Mus (Epy Kusnandar) dan kawan-kawan setelah berhenti dari dunia premanisme. Setelah tiga tahun, Kang Mus sendiri memulai bisnis kecimpringnya, dimana dalam perjalanannya bisnis yang digeluti oleh kang mus ini mengalami penurunan penjualan. Begitu pula dengan mantan anak buah kang mus yang lain menjalani kehidupannya masing-masing sebagai seorang mantan preman.

Ada yang berjualan di pasar, menjadi satpam, pawang kuda lumping, hingga pulang kampung untuk membuka usaha. Seperti

Gobang (Dedi Moch Jamasari), setelah pensiun sebagai preman, ia pulang ke kampungnya di Sukabumi berternak lele. Bisnis lele yang ia geluti pun akhirnya mengalami kendala. Ia pun kemudian kembali ke terminal, dan mengadakan reuni kecil-kecilan dengan kawan-kawannya, tanpa melibatkan Mus.

Di sisi lain, Mus juga menghadapi situasi di mana anaknya Eneng (Safira Maharani) dikecewakan oleh kekasihnya. Dan khawatir dengan kondisi anaknya yang mulai tumbuh dewasa. Permasalahan tersebut dan banyak permasalahan lain harus dihadapi Mus ketika sudah pensiun dari premanismenya.

Film ini mengambil latar tempat di Bandung yang khas dengan nuansa Sunda. Penyajian filmnya juga seperti keadaan masyarakat pada umumnya disertai dengan adegan komedi yang khas dalam film *Preman Pensiun*. Candaan-candaan dalam film ini sangat mengocok perut berkat akting kocak dari para pemain. Terutama, duet maut tampang sekuriti tapi hati Hello Kitty, yaitu Murad dan Firmansyah Pitra alias Pipit, yang dinilai sukses mencuri perhatian penonton lewat

aksi konyol mereka. Tidak Hanya komedi, film ini juga sarat akan nilai moral. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari film *Preman Pensiun*. Salah satunya adalah, seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan perintah, namun juga menanggung semua masalah dari orang-orang yang dipimpinnya. Ketika yang dipimpin mendapat masalah, sang pemimpin juga turut merasakan dampaknya.

Film preman pensiun sekaligus menghilangkan stigma negatif preman yang identik dengan kekerasan dan hal negatif lainnya. Bagi para penonton, film juga memberikan pesan berharga seperti perhatian yah kepada anaknya yang terimplementasi oleh Mus kepada Eneng, serta pentingnya menjaga amanah, dalam beberapa cerita yang diperankan Mus dengan para anak buahnya.

Film *Preman Pensiun* ini perdana tayang pada tanggal 17 Januari 2019. Dan dikategorikan sebagai film 13 tahun ke atas, yang mana film ini berjeniskan film keluarga dan dapat disaksikan bersama-sama dengan keluarga.

■ SITI MUNTAMAH

Pesugihan

Hari Taqwan Santoso

Ada sebuah pohon beringin besar berusia ratusan tahun di puncak bukit kecil, di perbatasan antara Kabupaten B dan Kabupaten G di Provinsi Y. Pagar setinggi pinggul orang dewasa dibangun mengelilingi pohon itu dan diberi gerbang kecil, sebagai tanda bahwa ia bukan sembarang pohon yang tumbuh secara liar dan menjadi besar karena sudah berusia ratusan tahun. Menurut cerita, pohon beringin itu adalah pesugihan, tempat meminta kekayaan pada setan dengan syarat harus menyerahkan nyawa seseorang sebagai tumbal. Di zaman modern, tempat itu sudah jarang didatangi. Meski begitu, sekarang aku merasa tak punya pilihan lain selain meminta bantuan pada setan penunggu pohon beringin yang dulu sangat terkenal itu.

Pada tengah malam aku sudah berada di depan pintu pagarnya. Melangkah masuk, aku pun merasa gerah. Ada hawa panas yang tiba-tiba mengelilingiku. Terlebih lagi, aku tidak melihat apa-apa kecuali pepohonan di tengah kepekat malam, dan terutama pohon beringin tua itu. Bulukudukku berdiri semua. Terkadang, ketakutan bisa merayap dari dalam diri kita sendiri bahkan ketika segala hal di sekeliling kita baik-baik saja. Di sekelilingku memang hanya ada pepohonan, tapi aku merasa diawasi oleh makhluk tertentu yang setiap saat bisa menampakkan diri



<https://i.pinimg.com>

dan mencelakaiku. Kekhawatiran inilah yang menjadi sumber ketakutanku. Tapi bagaimanapun juga aku sudah sampai di sini. Aku tidak bisa mundur.

Sebuah suara berbisik tepat di daun telinga kiriku, “Pejamkan matamu!” Seluruh bulu tengkukku semakin kaku, rasanya seperti ada jarum-jarum kecil yang tumbuh di tengkuk. Tubuhku gemetar, jantung berdebar tak menentu dan lututku lemas sampai aku bahkan tidak bisa beranjak barang selangkah, jangkanku lari. Sebenarnya aku bukan seorang penakut, reaksi seperti ini tidak pernah kualami sebelumnya, sama sekali.

Namun suasana kali ini berbeda, malam dan lingkungan sekitar memaksaku untuk mengalami apa yang disebut sebagai ketakutan. Dan ia membuatku nyaris tidak tahu apa yang harus kulakukan. “Pejamkan matamu!” kata suara itu sekali lagi. Dalam ketakutan dan dengan tubuh gemetar aku merasa tidak punya pilihan selain menurutinya. Kupejamkan mataku. Tidak jelas apa maksud suara itu menyuruhku memejamkan mata, tapi dengan mata terpejam aku pun berusaha menenangkan diri. Kuyakinkan diriku bahwa apa yang ada di sekelilingku hanya pepohonan, mereka memang hidup tapi bisu dan hanya bisa berdiam di tempat. Sama sekali tidak akan membahayakan. Aku berhasil. Detak jantungku secara berangsur-angsur mulai teratur, dan lututku sudah bisa

digerakkan sedikit demi sedikit.

“Nah, sekarang, buka matamu!” bisik suara itu lagi. Dan ketika aku melakukannya pohon beringin yang semula berdiri di depanku sudah tidak ada, ia berubah menjadi sesosok genderuwo. Ini juga baru pertama kalinya dalam hidup, aku menyaksikan sesosok genderuwo tepat di hadapanku, dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan dalam keadaan duduk sekalipun, tingginya masih dua kali lebih tinggi daripada aku. Sekujur tubuhnya dipenuhi bulu abu-abu, matanya merah menyala di tengah gelap, telinganya runcing dan beranting tiga. Di belakang, ekor yang berukuran sebesar pohon kelapa bergerak-gerak seperti ekor kucing, seolah mempunyai kesadaran sendiri. Genderuwo ini persis seperti apa yang dikatakan orang-orang.

Pada saat itu ketakutanku lenyap sama sekali. Terbukti bahwa ketakutan senyatanya hanya berasal dari kekhawatiran. Aku sudah melihat sosok makhluk itu. Betapa pun dia menyeramkan, lebih seram lagi ketika dia tidak menampakkan diri dan pikiranku mereka-reka apa yang akan terjadi. Genderuwo itu menyeringai, dan kubalas dengan senyuman.

Sejujurnya waktu itu aku justru sangat gembira. Palsanya dengan mata kepalaku sendiri, sekali lagi dengan mata kepalaku sendiri, bukan dari cerita orang atau buku dongeng yang ditulis orang zaman dahulu, aku melihat sebatang pohon beringin tua berubah menjadi makhluk bertangan dan berkaki. Perubahan yang terjadi seketika itu bukan tipuan murahan atau trik kamera. Perubahan itu nyata adanya. Perubahan itu adalah keajaiban, dan jika makhluk di hadapanku ini bisa menyiptakan keajaiban yang nyata, dia mungkin bisa mengabulkan keinginanmu yang sepertinya mustahil tanpa adanya keajaiban.

Aku terpesona dengan kenyataan itu. Tanpa sadar tangan kananku bergerak maju. Aku ingin menyentuh bulu-bulu cokelat yang berjarak tak lebih dari dua meter dariku itu. Aku ingin memastikan apakah apa yang kulihat ini nyata atau ilusi. Kalau makhluk di depanku ini semacam hologram belaka, mestinya aku tidak akan bisa menyentuhnya. Tanganku hanya akan menggapai udara. Namun sebelum aku lebih dekat barang sejengkal, genderuwo itu mulai bersuara, dan tanganku terhenti.

“Kau sepertinya tidak takut melihat wujud asliku?” gen-

deruwo itu sedikit heran.

“Saya bukan penakut...”

“Kliwon, sebut saja aku Mbah Kliwon.”

“Baik, Mbah Kliwon.”

“Selamat! Kau orang pertama yang tidak ketakutan melihat wujud asliku.”

“Saya justru kagum, dengan keajaiban yang baru saja saya saksikan, barangkali Mbah Kliwon bisa mengabulkan keinginan saya.”

“Langsung ke pokok permasalahannya, ya? Dasar manusia.” Genderuwo itu tersenyum sinis. “Kau menginginkan sesuatu, tapi kenapa meminta padaku dan tidak pada Tuhan Yang Maha Kuasa?”

“TAPI BAGAIMANA MUNGKIN BERDOA SETIAP HARI MASIH KURANG BANYAK? SUDAH MENJADI KENYATAAN BAHWA TUHAN TIDAK SELALU MENGABULKAN DOA MANUSIA, MESKIPUN DOA ITU DEMI KEBAIKAN BANYAK ORANG

“Itu sudah saya lakukan. Saya sudah rajin berdoa, tapi keinginan saya tak kunjung dikabulkan. Ada orang yang mengatakan bahwa saya kurang banyak berdoa. Tapi bagaimana mungkin berdoa setiap hari masih kurang banyak? Sudah menjadi kenyataan bahwa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa manusia, meskipun doa itu demi kebaikan banyak orang. Sehingga pada akhirnya, saya pun lelah menaruh harapan pada Tuhan. Jadi saya bermaksud mengalihkan harapan itu pada kekuatan yang lain.”

“Aha! Zaman dahulu, kami susah sekali mengajak manusia untuk menaruh harapan pada kami, karena adanya nabi-nabi. Mereka selalu menghalangi upaya kami menyesatkan manusia. Tapi sekarang, nabi-nabi itu sudah tidak ada dan perkembangan zaman membuat manusia mengembangkan pikiran yang meragukan ajaran mereka. Di satu sisi, pekerjaan kami menjadi lebih ringan. Aku tak perlu membujukmu karena kau yang datang sendiri dan mengatakan sudah bosan berdoa pada Tuhan secara sadar.”

Genderuwo itu tersenyum. “Baiklah, aku sanggup mengabulkan keinginanmu. Tapi biar kuperjelas, jika aku sudah mengabulkan keinginanmu itu berarti kau sudah menjadi budakku. Kau bisa menikmati seluruh pemberianku semaumu sampai kau mati, dan kalau kau sudah mati, kau harus ikut ke alamku dan pada hari kiamat kau harus menjadi batu pijakan bagiku di neraka nanti...”

“Saya siap!”

“Ha ha ha! Manusia yang sangat menarik! Baiklah. Selain itu, kau juga harus mengorbankan satu nyawa manusia. Apa kau siap dengan korban itu?”

“Saya akan menyerahkan nyawa saya sendiri sebagai korban.”

“Heee?” Genderuwo itu mendadak keheranan. Dia kebingungan. Dengan telunjuk, dia menggaruk kepalanya yang berrambut gimbal. “Kau menginginkan harta dan siap menyerahkan satu nyawa sebagai korban. Tapi kemudian kau menyerahkan nyawamu sendiri. Bagaimana kau akan menikmati harta itu kalau kau mati?”

“Lho, lho, lho? Siapa yang menginginkan harta? Saya tidak pernah bilang ingin meminta harta.”

Mbah Kliwon si Genderuwo tampak semakin bingung.

“Apa yang saya inginkan adalah perdamaian bagi seluruh makhluk di muka bumi, khususnya manusia. Saya bosan melihat pertumpahan darah di mana-mana karena perebutan sumber daya alam. Saya bosan melihat kesenjangan kekayaan yang mengakibatkan orang-orang kaya semakin kaya dan orang-orang miskin semakin miskin. Ketika saya meneliti apa yang menyebabkan hal itu, saya menemukan bahwa sumber pokoknya adalah keserakahan sekelompok manusia yang kemudian mengorganisasi diri dan membentuk negara adikuasa sekaligus kekuatan global. Kekuatan inilah yang lalu menimbulkan kemiskinan bahkan penderitaan yang lebih kejam daripada kematian di sejumlah tempat. Seandainya kekuatan ini melemah dan melepaskan cengkeramannya para orang-orang di dunia, betapa banyak nyawa yang akan terselamatkan? Bukankah hidup di dunia yang aman dan damai, di mana semua manusia rukun dan tidak saling berselisih, adalah hidup yang indah? Sayangnya kehidupan seperti itu saat ini hanya mimpi belaka. Sekelompok manusia yang lain mungkin bisa mengorganisasi diri untuk melawan kekuatan global ini, tapi sejarah menuturkan bahwa mereka tidak pernah cukup kuat. Di sisi lain, Tuhan sendiri mengklaim bahwa diri-Nya Mahakuasa atas segala sesuatu. Tentulah melemahkan kekuatan global tersebut hanya serupa meniup debu jika klaim itu benar. Tapi kenyataannya, meskipun aku tak putus-putusnya berdoa agar Tuhan melemahkan kekuatan global itu, tapi justru setiap hari ia semakin kuat, dunia semakin rusak, dan semakin banyak orang yang menderita karena keserakahan mereka.”

“Manusia!” potong genderuwo itu. “Permintaan macam apa itu!? Kau salah alamat. Aku bisa mengubah dedaunan menjadi uang kertas, bebatuan menjadi berbongkah emas. Supaya apa kaupikir? Supaya hati manusia semakin buta. Dengan begitu peperangan dan kekacauan akan tetap ada. Kau ingin aku mengendalikan seluruh dunia, terlebih agar supaya setiap makhluk berada dalam kedamaian? Yang benar saja! Sontoloyo benar kamu! Aku tidak punya kekuatan sebesar itu. Lagipula, kalau pun punya, tak akan kukabulkan keinginanmu. Bangsaku justru diciptakan untuk menebar benih-benih kebencian dalam hati manusia agar mereka saling bermusuhan dan menebar kekacauan.” Lalu dia menamparku keras-keras. Aku ingat aku tertental beberapa meter sebelum kesadaranku hilang.

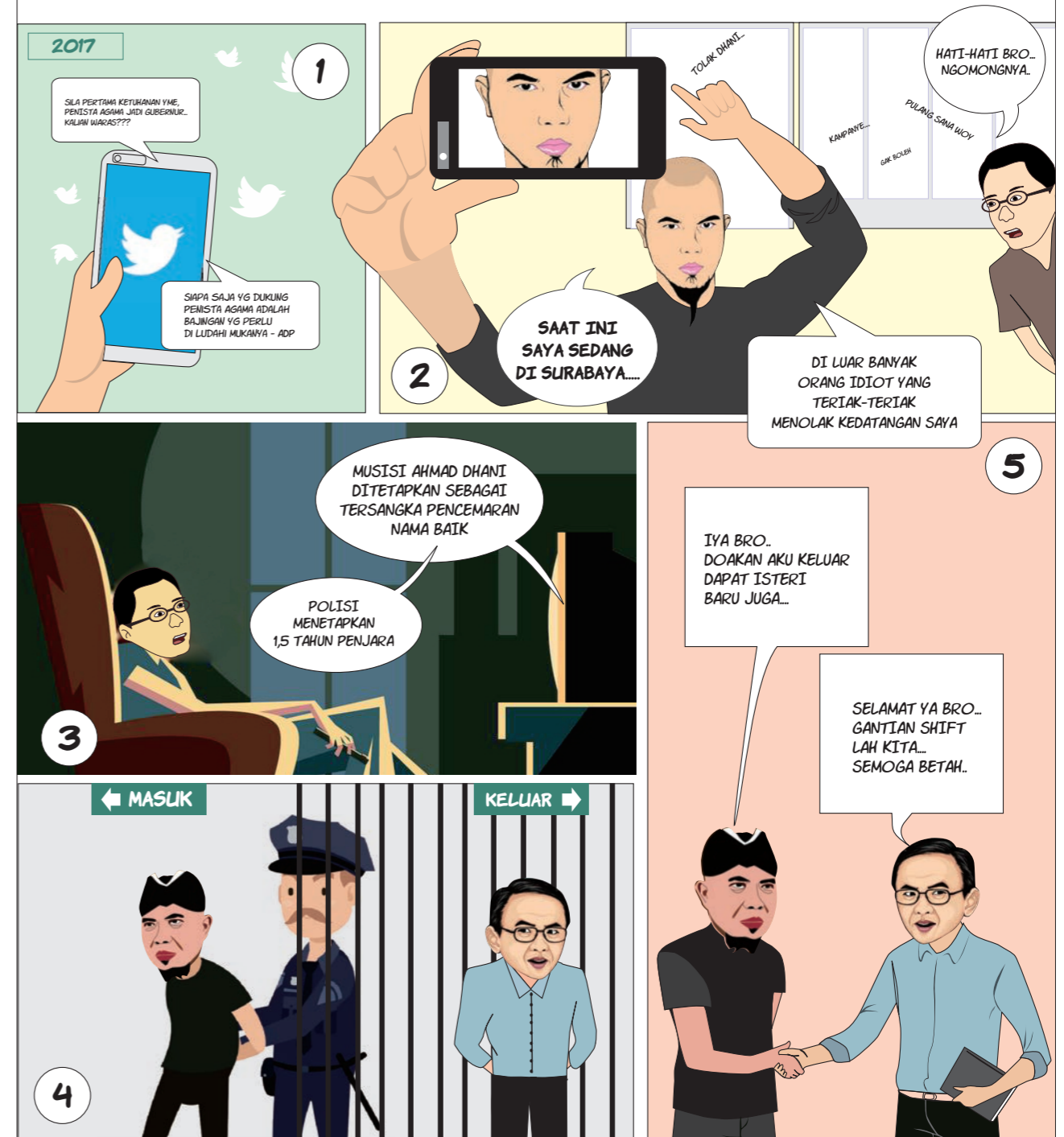
Aku terbangun dengan tergegap pagi harinya. Matahari sudah meninggi. Tidak ada genderuwo atau pohon beringin di sampingku. Sejenak aku tidak tahu aku sedang berada di mana, tapi setelah mengamati sekeliling aku mengenali daerah ini. Aku sedang berada di tepi jalan di dekat rumah. Jalan pulang yang akhirnya kutapaki dengan tangan kosong.

Kalau dipikir-pikir, si genderuwo memang hanya setan, dan setan tidak pernah peduli pada masalah umat manusia. Yah, setidaknya perjanjianku dengannya batal dan karena itu aku masih bernyawa. Dan nyawa yang masih melekat ini, simpulku kemudian, akan kumanafaatkan sebaik mungkin untuk mewujudkan dunia yang kucita-citakan itu tanpa peduli apakah aku nanti gagal. Barangkali memang seharusnya manusia itu lebih percaya dengan dirinya sendiri dan mulai tidak menggantungkan harapan pada mereka yang senyatanya tidak peduli dan tidak benar-benar ingin membantu mewujudkan harapan itu, meskipun harapan itu baik.

“
DI SISI LAIN, TUHAN SENDIRI
MENGKLAIM BAHWA DIRI-
NYA MAHA KUASA ATAS
SEGALA SESUATU. TENTULAH
MELEMAHKAN KEKUATAN GLO-
BAL TERSEBUT HANYA SERUPA
MENIUP DEBU JIKA KLAIM ITU
BENAR.”



KOMIK BANG PEPE
GANTIAN SHIFT



Mendagri Minta Humas Pemda se-Indonesia Sosialisasi Kinerja Pemerintah



JAKARTA - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tjahjo Kumolo mengumpulkan 514 humas Pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota se-Indonesia. Mendagri meminta humas tak hanya menyiarkan kegiatan kepala daerah.

“Tapi harus bisa jadi juru bicara, baik Pemerintah Pusat dan Daerah. Siapa pun presidennya, siapapun gubernurnya, wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah,” kata Tjahjo di sela-sela Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 11 Februari 2019.

Tjahjo menambahkan, tugas humas lainnya mensosialisasikan agar warga memakai hak pilihnya di tempat pe-

mungutan suara (TPS) pada Pemilu 2019, yang akan jatuh pada 17 April mendatang.

“Tugas humas menyampaikan hak suara masyarakat terjaga, untuk bisa hadir di TPS. Tingkat partisipasi, sangat penting. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS,” katanya.

Ia mengakui, hal tersebut tidaklah mudah, karena masih terbatasnya sarana yang dimiliki beberapa Pemda, terutama yang berada di Indonesia timur. “Kalau humas tingkat dua yang di bagian timur website saja belum ada,” katanya.

Selain itu, Tjahjo mengingatkan Biro Hukum Pemda juga harus ikut proaktif

memberikan masukan. Baik diminta maupun tidak diminta oleh kepala daerah.

“Khususnya, yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup. Jadi, siapapun wali kota, bupati, gubernur harus diberikan masukan sebelum tekan kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mendukung langkah Mendagri jelang pencoblosan di Pemilu 2019. “Kewajiban pemerintah ingin menciptakan kondisi yang nyaman, aman, tertib, semuanya berjalan dengan baik,” katanya.

■ PUSPEN KEMENDAGRI

Realisasi Anggaran Kemendagri Naik 46 Peringkat



JAKARTA - Dalam Rapat Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang dilaksanakan di The Media Hotel, Jakarta, Senin (4/2), Plt Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Hani Syopiar Rustam menyampaikan realisasi anggaran Kemendagri pada tahun lalu (2018) serta pagu alokasi anggaran Kemendagri pada 2019.

Menurut Hani, realisasi anggaran Kemendagri pada 2018 mengalami peningkatan jika dibanding 2017. Realisasi anggaran Kemendagri pada 2018 berada pada peringkat 29 dari seluruh Kementerian/Lembaga. Realisasi anggaran Kemendagri pada tahun lalu mencapai 94,91%, atau di atas rata-ra-

ta nasional yang hanya 90,48%.

“Pada 2018 peringkat realisasi Kemendagri naik 46 peringkat dibanding realisasi 2017 yang berada pada peringkat 75. Dan pada 2017, realisasi anggaran Kemendagri hanya mencapai 82,77%,” jelasnya.

Selain itu, menurut Hani, anggaran Kemendagri pada 2019 mencapai Rp 3,172 triliun. Dana tersebut terbagi dalam beberapa alokasi seperti belanja barang, belanja pegawai, serta belanja modal. Dalam rapat tersebut Hani juga memetakan jumlah anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di Kemendagri. Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri mendapat alokasi sebesar Rp

44,36 miliar, sekaligus menjadi Komponen dengan anggaran paling kecil di Kemendagri.

Hani berharap anggaran besar tersebut bisa memberikan kontribusi yang nyata. Kinerja Kemendagri juga diharapkan bisa terus membaik. Ia juga berharap agar pencapaian realisasi anggaran tahun lalu bisa dipertahankan.

“Realisasi anggaran tahun lalu, telah mematahkan asumsi yang kerap muncul tentang anggaran Kemendagri yang tidak pernah mencapai 90%. Kita berharap minimal realisasi anggaran tahun ini tetap sama seperti tahun lalu,” ujarnya.

■ SAIDI RIFKY

Sampah Laut dan Kisah Tragis Ikan Paus

Belum lama ini masyarakat dikejutkan dengan berita terdamparnya bangkai paus jenis *sperma* di Pulau Kapota, Kepulauan Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang lebih mengesankan, di dalam isi perut bangkai paus *sperma* tersebut ditemukan sampah plastik hampir seberat 6 kg, dengan macam ragam jenis sampahnya: 3,2 kg talia rafia, 115 buah gelas plastik, beberapa kantong plastik, botol minuman dan karung plastik. Miris memang mendengar berita tersebut meskipun sebetulnya bukan hal yang baru juga karena beberapa periode sebelumnya sudah sering ditemukan satwa laut yang ditemukan mati terjerat sampah. Kondisi ini makin memprihatinkan jika merujuk 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan dan bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah laut terbanyak di dunia.

Tak heran jika pemerintah dan seluruh pihak yang terkait, tak henti-hentinya terus menggelorakan semangat "hijrah" membuang sampah di laut. Termasuk dalam forum *Our Ocean Conference* (OOC) yang tahun lalu digelar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan perlunya sinergitas kerja seluruh pemangku kepentingan di bidang kelautan. Hal ini didasari fakta bahwa Indonesia adalah negara bahari dengan luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Karenanya disepakati bahwa masa depan semua negara termasuk Indonesia adalah di bidang kelautan. Sayangnya, sebagaimana disebutkan di awal bahwa tantangan di bidang kelautan tidak kalah besarnya dibanding daratan. Mungkin malah justru tantangan di lautan lebih susah penanganannya. Permasalahan tata kelola, rente ekonomi yang muncul, rantai distribusi serta persoalan teknis lainnya menyebabkan kontribusi kelautan di Indonesia masih terlampaui minim dibandingkan potensi yang ada.

Untungnya, di era pemerintahan saat ini sektor kelautan secara perlahan sudah ditata dengan pendekatan yang lebih mengedepankan aspek efisiensi dan efektivitas kebijakan. Tak mudah memang memperbaiki tata kelola sektor kelautan. Dibutuhkan keberanian, keuletan serta ketangguhan birokrasi yang tak kenal kompromi dengan segala tantangan yang selalu menghadang termasuk di dalamnya permasalahan sampah di laut. Menurut banyak pihak timbulan sampah di laut Indonesia sudah masuk kategori darurat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh pemerintah, Indonesia masuk kategori produsen sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Yang mungkin perlu disadari, sifat sampah plastik tidak mu-



<https://us.123rf.com>

dah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik (zat menyebabkan kanker). Jika sampah plastik tersebut dapat diolah kembali secara baik sebetulnya memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume sampah di DKI Jakarta saja sekitar 8,700 ton per hari, di Medan 1,500 ton per hari, Bali sebesar 650 ton per hari, Surabaya sekitar 400 ton per hari dan Bandung 345 ton per hari. Secara keseluruhan, total jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia per harinya

175,000 ton atau 0,7 kg per orang dengan prediksi di tahun 2019 menjadi 67.1 juta ton per tahun. Dilihat dari komposisi sampah nasional tahun 2016-2017, yang terbanyak memang berasal dari sisa makanan sebesar 41,61% disusul kemudian oleh sampah plastik sebesar 15,75% dan kayu, ranting dan daun sebesar 15,32%. Sementara dari sumber sampahnya, terbesar adalah sampah rumah tangga (52,78%) disusul sampah pasar tradisional (12,32%) dan sampah pusat perniagaan (9,06%).

Untuk menyatukan segala langkah dan aksi nyata tersebut, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Regulasi tersebut sekaligus melengkapi beberapa ketentuan teknis yang sudah ada terlebih dahulu terkait percepatan upaya penanganan sampah baik Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Kelengkapan-kelengkapan regulasi tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah mengatasi permasalahan sampah nasional.

Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut sendiri dimunculkan dengan mempertimbangkan fakta telah ditemukannya kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota dan sumber daya laut di perairan Indonesia. Dinyatakan juga bahwa sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Sampah laut itu sendiri didefinisikan sebagai sampah yang berasal dari daratan, badan air dan pesisir yang mengalir ke

laut atau sampah yang berasal dari kegiatan laut.

Pada tahun 2025, pemerintah berjanji untuk mengatasi sampah plastik di laut hingga 70%. Hal yang sama juga disampaikan di dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2017 sebesar 30% mengurangi jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan 70% penanganannya pada periode 2025. Mengingat urgensi hal-hal tersebut, maka sekiranya dibutuhkan adanya penguatan perencanaan, penganggaran dan pengorganisasi yang lebih terpadu. Diperlukan juga sebuah langkah percepatan yang bersifat komprehensif dan terpadu melalui sebuah Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut. Tak ketinggalan pula masalah politik anggaran yang mendukung terlaksananya penanganan sampah laut.

Politik anggaran

Satu hal yang mengaitkan seluruh kebijakan terkait penanganan sampah tersebut adalah diperlukannya dukungan nyata pendanaan dari pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Mekanisme nya dapat melewati beberapa skema sesuai dengan aturan yang berlaku. Dilihat dari aspek kewenangan misalnya, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kelautan termasuk di dalam urusan yang kewenangannya telah diserahkan ke provinsi. Kondisi ini mempertimbangkan aspek lokasi, manfaat atau dampak negatifnya serta peranan strategisnya berada di kewenangan provinsi.

Di dalam APBD sendiri, urusan kelautan dan perikanan masuk ke dalam kategori urusan pilihan. Urusan pilihan adalah urusan wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Ada beberapa urusan yang masuk kategori urusan pilihan daerah diantaranya kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Jika urusan wajib, layak *disupport* dengan alokasi belanja APBD, maka urusan kelautan dan perikanan justru menghendaki terbentuknya struktur pendanaan publik berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan utama lainnya.

Karena kewenangannya berada di provinsi dan masuk di dalam urusan pilihan di daerah, maka terkait pengelolaan politik anggaran penanganan sampah di laut, sudah semestinya dijalankan melalui mekanisme belanja kementerian/lembaga (K/L). Wajib dipilih K/L teknis mana yang menjadi ujung tombak utama apakah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaras dengan tugas fungsi utamanya. Atau justru berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) merujuk kepada penanganan masalah sampah secara umum atau ditarik di ranah Menteri Koordinator dalam hal ini Menko Maritim. Kejelasan PIC pengelola menjadi salah satu syarat utama tercapainya pengelolaan yang optimal ke depannya.

Setelah disepakati, prioritas penanganan sampah di laut wajib dimasukkan ke dalam daftar prioritas penganggaran untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa program dan kegiatan secara detail. Patut dijaga secara bersama konektivitas antara penyusunan daftar kegiatan program dengan kebutuhan anggarannya. Jika dirasa masih kurang, bentuk penguatan alokasi anggaran dapat dilewatkan skema belanja dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui anggaran K/L teknisnya (KKP/KLHK/Menko Maritim).

Transfer ke Daerah juga dimungkinkan melakukan *affirmacy policy* melalui kebijakan anggaran yang bersifat tematik dan spesifik melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). Penanganan sampah secara umum sudah diakomodasi melalui DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika dikehendaki, menu di dalam alokasi DAK Kehutanan dan Lingkungan hidup dapat ditambah tugas menangani sampah di laut atau justru diletakkan di dalam komponen DAK Kelautan dan Perikanan. Bentuk *affirmacy policy* lainnya dapat diwujudkan dalam skema *reward* kepada daerah yang nantinya terbukti sukses menangani sampah di laut dalam bentuk skema Dana Insentif Daerah (DID).

Dari sisi hulunya, pemerintah juga memungkinkan untuk mengenakan pungutan atau cukai terkait plastik sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Juga diamankan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Di dalam lampiran Perpres Nomor 83 Tahun 2018 juga diamankan kepada Kemenkeu untuk menyusun peraturan tentang cukai plastik dengan output utamanya Peraturan Pemerintah (PP). Pengenaan awal cukai plastik akan diarahkan kepada penganan cukai kantong plastik terlebih dahulu.

Sebagai penutup, tantangan penanganan sampah di laut memang makin berat ke depannya. Sampah sebagai sebuah akumulasi buangan dari aktivitas manusia tentu berkorelasi positif dengan peningkatan perekonomian. Ekonomi semakin berkembang, potensi sampah yang muncul juga semakin banyak. Karenanya komitmen nyata dari pemerintah ini seharusnya dapat dijadikan momentum bersama seluruh pihak yang berkepentingan di dalam menyelamatkan Indonesia dari bahaya darurat sampah di laut.

Joko Tri Haryanto

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan



Capaian Kinerja Bu Risma

Pada 9 Januari 2019, Kompas menobatkan Surabaya sebagai juara Kota Cerdas Indonesia untuk kategori Metropolitan. Enam dimensi Boyd Cohen dijadikan parameter penilaian, yaitu lingkungan cerdas, mobilitas, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan kualitas hidup. Selain menyejahterakan masyarakat, Sang Walikota, Tri Risma Harini mengembangkan *e-government* Surabaya untuk mempersingkat proses bisnis dengan tetap memenuhi unsur-unsur tata kelola yang baik. Berbagai layanan publik *online* bisa diakses melalui 203 *e-kios* yang tersebar di kantor pemerintah, puskesmas, rumah sakit, 44 *broadband learning center* (BLC).

Pemko Surabaya berinteraksi dengan warganya melalui *e-wadul*, *e-sapawarga*, kanal *twitter*, *facebook*, *youtube*, dan *call center/SMS*. *Call center* 112 membantu korban bencana; mulai kebakaran, pohon tumbang, angin puting beliung, kecelakaan, kejahatan, masalah sosial, penemuan jenazah, PLN/PJU padam, sampai permintaan *ambulance* ataupun mobil derek. Rata-rata terdapat 1.281 panggilan per hari, dengan waktu bicara 43 detik, dan *respond time* 7,4 menit. Untuk memastikan respon cepat ini, sistem terhubung dengan gawai di tangan Risma dan *command room* yang terkoneksi dengan lima Posko bencana dan ratusan CCTV.

Camat dan Lurah di Surabaya diperintahkan melaksanakan *out-reach*, di mana pada 2017 telah memberikan pekerjaan kepada 356 orang, serta menemukan solusi bagi berbagai permasalahan. *Command center* menghubungkan berbagai instansi; Dinas, kecamatan, kelurahan, bahkan RT/RW, menciptakan atmosfer *smart city*. Pengelolaan kerumitan kota dipermudah *e-SDM*, *e-permit*, *e-monitoring*, *e-office*, *pajak online*, *e-health*, *e-disub*, *Surabaya Intelligent Transport Sistem* (SITS), dan *SIM-PROLAMAS*. *E-education* Surabaya melayanani penerimaan siswa baru, seleksi kepala sekolah, *try out*, dan rapor secara *online*, dan seluruh Ujian Nasional terkomputerisasi.

Untuk perizinan, *Surabaya Single Window* memudahkan warga yang bahkan bisa diakses melalui *smart phone*. Versi *offline*-nya disediakan melalui *mall* perijinan Siola yang melayani 230 jenis layanan sekaligus. Demikian pula *e-health* yang telah dilengkapi akses rekam medis dan pemberian resep secara *online* memudahkan pendaftaran pasien sehingga mengurangi antrean.

Urusan pembuatan akta kelahiran di Kota Buaya bukan saja



gratis, bahkan sertifikatnya bisa diantar ke rumah sakit/rumah, seperti halnya dokumen kependudukan atau perijinan lainnya. Layanan aplikasi *e-lampid* (kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk) disediakan melalui tiga bahasa; bahasa Indonesia, Jawa dan Madura. Dalam pengelolaan sampah, Pemkot Surabaya juga berhasil mewujudkan monitoring TPA Benowo secara *real time*.

Pengelolaan keuangan di Pemko Surabaya telah didukung oleh *e-planning*; *e-musrenbang*, *e-devplan*, dan *e-deployment*. Untuk penganggaran sangat terbantu oleh *e-budgetting*, *e-DPA*, *e-project*, *e-procurement*, *e-delivery*, *e-payment*, *e-accounting*, *e-inventory*, *e-simbada*, *e-controlling*, *e-performance*, *e-tax*, *e-audit*, dan *e-fasos fasum*. Untuk mengejar kecepatan proses keuangan, bawahan walikota wanita Surabaya pertama ini bisa melakukan tandatangan elektronik kapanpun dan dimanapun menggunakan gawai.

Capaian pembangunan

November-Desember di penjurukota Surabaya bermekaran bunga Tabebuya; merah, putih, kuning, merah muda, oranye dan magenta. Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2005) ini berhasil menyulap 372 taman kota, menghijaukan lingkungan, menginisiasi *urban farming*, menjadikan wajah Surabaya lebih manusiawi, hijau dan asri. Taman Bungkul bahkan dinobatkan sebagai yang terbaik se-Asia.

Sebagai paru-paru kota, tempat berinteraksi, *refreshing*, berolahraga, berkesenian, atau bahkan ber-*selfie*, taman-taman kota Surabaya menyediakan akses wifi gratis, seperti halnya di Balaikota, Puskesmas, BLC, sentra-sentra PKL, perpustakaan, dan sekolah-sekolah. Bu Risma berhasil merevitalisasi infrastruktur ibukota Jawa Timur agar setara dengan kota-kota di dunia; 1.600 kilometer jalan, 1.700 kilometer saluran air, serta pedestrian dengan perencanaan holistik (menghindari gali-tutup) termasuk memperhatikan aspek aksesibilitas bagi kaum *disable*.

Dalam hal penataan kampung, Risma menekankan pentingnya rembug warga dalam menentukan desain ataupun bantuan perbaikan rumah warga miskin. Terjaganya lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas. Bagi kalangan miskin kota, Risma menyediakan rumah-rumah susun dengan sewa mulai 10 ribu sampai 90 ribu rupiah per bulan. Fasilitasnya lengkap, termasuk Puskesmas Pembantu,

PAUD, perpustakaan, BLC, bus sekolah, dan Sentra PKL yang telah mencapai 45 buah di penjurukota.

Pemko Surabaya juga membangun berbagai fasilitas olahraga standar internasional tersebar di pelosok kampung; 361 lapangan di area seluas 259 hektar. Terdapat 104 lapangan futsal, 91 bola voli, 90 bola basket, 33 sepak bola, 17 bulu tangkis, dan 5 lapangan tenis. Juga 11 arena panjat tebing, lima *jogging track*, dua arena lompat jauh, sebuah lapangan *hokey*, *softball*, serta sirkuit *drag race* dan balap motor di Benowo.

Bukan hanya bangunan fisik, Surabaya mewujudkan pendidikan untuk semua, termasuk kaum disabilitas. Tersedia beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah, dimana SD dan SMP tak dipungut biaya, lima persen kuota disediakan bagi anak keluarga miskin-tanpa tes. Selain perpustakaan, tersedia taman bacaan dan mobil pintar di lebih 1.400 lokasi. Rumah-rumah matematika dan bahasa (12 bahasa) diwujudkan menggandeng para ekspatriat sebagai *volunteer* pengajarnya, sebuah paket hemat dalam membangun pengetahuan.

Layanan kesehatan warga digratiskan melalui layanan 63 Puskesmas dan 31 rumah sakit. Saat warga memerlukan *hemodialisa* mingguan di mana dua kali ditanggung BPJS, dua sisanya dibiayai Pemko Surabaya. Mobil ambulans dan jenazah disediakan gratis 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dalam setahun melayani tak kurang 12.873 orang (Desember 2017). Lebih dari 29 ribu lansia, difabel dan yatim piatu diberikan makanan gratis. Selama dua periode kepemimpinan Risma, Indeks Pembangunan Manusia penduduk Surabaya meningkat dari angka 77,2 pada Tahun 2010 menjadi 81,07 pada tahun 2017.

Risma mentransformasikan semangat kepahlawanan dalam aktivitas kekinian warganya melalui program "pahlawan ekonomi" bagi 8.600 UKM. Disediakan display pameran produk UMKM di kantor pemerintah, Balaikota, Sentra UKM dan *mall-mall*. Pemko menciptakan kampung-kampung unggulan dengan produk-produk khasnya, termasuk menyiapkan keterampilan bagi warga binaan bekas lokalisasi melalui wirausaha mandiri; pusat batik, sablon, udang kremes, atau telur "Dolly".

Para "pejuang muda", wirausahawan baru terus dilahirkan lebih dari 600 jumlahnya. Di tengah dunia yang disruptif, diberikan pelatihan *digital marketing*, *branding and packaging*, ataupun *workshop* tata rupa, sehingga memungkinkan mereka bersaing di dunia maya dan bahkan global. Bagi para *start up* Surabaya juga disediakan *co-working space* Koridor di Siola yang didukung *Youtube* dan *google* gapura.

Lew Kwan Yew - *World City Price Forum* pada 9 Juli 2018 menobatkan Surabaya sebagai *Special Mention City 2018*, mengalahkan Kota Hamburg dan Tokyo. Ini sebuah capaian besar

Nico Andrianto

Kepala Seksi Pemeriksaan Kinerja, Direktorat Litbang
Badan Pemeriksa Keuangan -RI



karena dinilai oleh 69 profesor berbagai keilmuan dari seluruh dunia. *New York Times* menobatkan Risma walikota terbaik di dunia. Majalah *Fortune* menempatkannya pada urutan ke-24 (setingkat diatas Mark Zuckerberg) sebagai *Worlds Greatest Leaders*. Ia pernah semeja dengan Raja Salman atau Pangeran Charles. Pada 14 September 2018, Risma dipercaya memimpin *Asia Pacific-United Cities Local Government*.

Efisiensi dan efektivitas manajemen

Risma adalah satu dari sedikit Kepala Daerah yang menjalankan prinsip-prinsip *public financial management* dengan baik. APBD Surabaya tidaklah terlalu besar, jika dibandingkan 3,3 juta jiwa penduduk yang tersebar di 334,51 kilometer persegi kota (terbesar kedua di Indonesia). Nilainya pada tahun 2017 sebesar 8,5 Triliun dengan porsi alokasi terbesarnya 24 persen untuk pendidikan.

Risma menghemat belanja barang dan jasa dengan *e-procurement* demi harga terendah. Banyak yang protes pada awalnya, bahkan mengancamnya, namun Risma siap mati mengadvokasi kebijakannya. Seperti seorang ibu yang harus cermat mengatur keuangan keluarga, Risma melarang belanja kamera digital, karena dianggapnya fungsinya telah ada pada *smartphone*. *Printer*-pun cukup digunakan secara *sharing*.

Tentu marah-marah di depan publik bukanlah indikator keberhasilan manajemen, namun setidaknya mampu mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Setidaknya Risma efektif menyelesaikan *bottlenecking* permasalahan *on the spot*, seperti pada pelayanan *e-KTP* yang bertele-tele. Sebagai bentuk *leading by example*, sering Risma tertangkap kamera warga membersihkan sendiri kantor, saluran air, ruang publik dan bahkan menyelesaikan kemacetan lalu lintas.

Namun di dunia ini tidak ada yang sempurna. Risma merasa gagal saat terjadi peristiwa tragis terorisme di Surabaya. Namun Risma tak mau berhenti belajar dari kemajuan kota-kota di dunia, termasuk merancang sistem yang bisa mengenali dan memantau pergerakan terduga teroris. Mengubah kebiasaan dan *mindset* warga adalah PR terbesarnya. Ia bermimpi suatu saat anak-anak Surabaya mampu bersaing di level dunia.

Saat mengelola satuan-satuan kerja di bawahnya, walikota wanita pertama Surabaya ini memegang filosofi integrasi lintas sektoral, dan tidak boleh ada unit yang "menganggur". Karena capaian-capaian kinerja Kota Surabaya dalam pelayanan publik di atas rata-rata kriteria yang bisa disusun, Pemko Surabaya jarang menjadi obyek pemeriksaan kinerja BPK. Surabaya dalam banyak hal justru menjadi ukuran (*benchmarking*) tentang bagaimana seharusnya sebuah kota dikelola.

Teknologi Informasi

Korupsi sistemik sudah mengakar dalam tatanan kerja birokrasi. Pemerintah mengupayakan perbaikan tata kelola dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tidak bisa dimungkiri, penggunaan teknologi informasi memang menjadi andalan dan tulang punggung pemerintah dalam upaya memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Mulai dari perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*), hingga pengadaan menggunakan *e-catalog* dan *e-procurement* (Bhatnagar 2003a; Ndou 2004:1-2; Andersen 2009, Shim & Eom 2008; Kim et al. 2009). Selain itu, pemerintah juga mendorong kebijakan satu peta dan satu data untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan korupsi juga dilakukan dengan memperbaiki regulasi yang mengatur ihwal korupsi. Setidaknya, pemerintah sudah melahirkan tiga produk hukum untuk mempercepat pemberantasan korupsi, yaitu: Inpres No 7 Tahun 2015, Inpres No 10 Tahun 2016, dan Perpres No 54 Tahun 2018. Dari tiga aturan hukum itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam aksi pencegahan korupsi sangat terasa, mulai dari sekira 30 persen pada 2015 meningkat menjadi lebih dari 81 persen pada 2018. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui kewajiban pelaporan dan publikasi secara daring terhadap perkembangan kegiatan di Kementerian/Lembaga. Sebagian besar instruksinya adalah soal sistem, terutama penerapan teknologi informasi dan komunikasi demi transparansi.

Secara teoretik, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa hingga penyusunan anggaran menjamin keterbukaan dan transparansi (Von Haldenwang, 2004:427). Pertanyaannya, apakah penggunaan teknologi informasi itu serta-merta efektif mengurangi korupsi? Meski data di atas menunjukkan ada peningkatan, namun faktanya, proses *e-procurement* pun tetap bisa “diakali” oleh oknum eksekutif dan legislatif. Buktinya, kehebohan proses pengadaan UPS di berbagai sekolah menengah negeri di Jakarta tempo hari membuka tabir koruptif yang terjadi.

Penggunaan teknologi informasi senyatanya masih bisa diakali oleh oknum-oknum yang memang sejak awal berniat korupsi. Ada beberapa upaya melakukan korupsi melalui teknologi informasi. Salah satu modus yang sudah banyak dibincangkan adalah pengaktifan *server*

database e-procurement pada jam-jam tertentu dengan durasi relatif singkat. Penyedia barang dan jasa yang sudah dikondisikan untuk ikut serta akan memperoleh bocoran mengenai waktu *server* dihidupkan. Setelah itu *server* kembali dimatikan, sehingga penyedia barang dan jasa yang “tidak terkondisikan” gagal mengunggah dokumen penawaran harga. Jika cara mematikan *server* dianggap terlalu frontal, *admin server* dapat menurunkan besaran *bandwidth server* hingga taraf minimal. Jadi, *server* tetap selalu aktif namun karena minimnya *bandwidth*, dokumen penawaran dari penyedia yang “tidak terkondisikan” tetap tidak bisa masuk, karena umumnya ukuran *byte* dokumennya relatif besar.

Lalu pertanyaan berikutnya, korupsi seperti apa yang bisa diselesaikan dengan pendekatan teknologi informasi? Pertanyaan seperti itu sejatinya bukan untuk mereduksi persoalan bahwa seolah-olah tidak ada banyak cara untuk meredam perilaku koruptif atau penggunaan teknologi dianggap tidak mampu menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Setidaknya, korupsi pada level tertentu seperti pengurusan layanan pencatatan sipil, lalu lintas, dan jenis layanan sehari-hari lainnya, penggunaan teknologi informasi cukup efektif. Tetapi, untuk jenis korupsi kebijakan seperti mafia pajak, pengadilan, mafia sumber daya alam, dan perbankan, teknologi informasi agak sukar menjangkanya.

Untuk kasus seperti itu, efektivitas pencegahan korupsi hanya bisa dilakukan dengan mensinergikan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yakni Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikutnya, perlu ada pelibatan peran masyarakat, misalnya, melalui perorangan, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Maka perlu ada sosialisasi dan edukasi pejabat dan kurikulum pendidikan tentang pola hidup sederhana, budaya malu, dan kebiasaan tidak korup.

Efektivitas pemberantasan praktik korupsi juga perlu didukung oleh penerapan sejumlah mekanisme *legal* seperti penerapan pembuktian terbalik, pemiskinan koruptor, sanksi sosial seperti kerja sosial agar pelaku korupsi belajar bekerja secara bertanggung jawab bagi masyarakat dan bermanfaat bagi lingkungan, serta sanksi pengembalian dana hasil korupsi.

● Moh Ilham A Hamudy

Hasil Uji Sampel Kualitas Air di Rusunawa Tanah Merah dan Cilincing

Tanggal pengambilan sampel :
21 Desember 2018

- Lokasi pengambilan sampel
- 1 Unit Rusunawa Tanah Merah, Pluit, Jakarta Utara.
 - 2 Jalan Belah Kapal, Cilincing, Jakarta Utara.



Ambang Batas*:

- Rendah
- Tinggi

Rusunawa Tanah Merah, Jakarta Utara.	Indikator	Jalan Belah Kapal, Cilincing, Jakarta Utara
pH		
6,5 (Rendah) 8,5 (Tinggi)	6 (pH unit)	6,2 (Rendah) 8,5 (Tinggi)
Mangan		
- (Rendah) 0,5 (Tinggi)	<0,0050 (mg/l)	<0,0050 (Rendah) 0,5 (Tinggi)
Total Escherichia Coli		
- (Rendah) 0 (Tinggi)	<1 (CFU/100ml)	<1 (Rendah) 0 (Tinggi)

*Standar Permentan Nomor 32 Tahun 2017

SUMBER: HARIAN KOMPAS INFOGRAFIS: ARDI



RESEARCH AND
DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Call For

PAPERS

Jurnal Bina Praja

THEME

HOME AFFAIRS GOVERNANCE

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

Published

May & November



Submit
a scientific paper
on the theme of
Home Affairs Governance
to jurnal.kemendagri.go.id

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) |

For the writing systematics and format, see jurnal.kemendagri.go.id | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

INDEXED BY:



Accredited by Sinta 2:
No 21/E/KPT/2018

FOR MORE INFORMATION
CONTACT US

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
jurnalbinapraja@yahoo.com